

# **DRS. JAP TJWAN BING**

**Pelopop Pembauran**



**Direktorat  
udayaan**

8

**Oleh Darto Harnoko**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA**

**1986**

158/1989

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

# DRS. JAP TJWAN BING

Pelopor Pembauran

PERPUSTAKAAN  
DIREKTORAT SEJARAH &  
NILAI TRADISIONAL

Oleh Darto Harnoko

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1986

PEPUSTAKAAN  
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor induk : 158 / 1989  
Tanggal terima : 22-6-1989  
Tanggal catat : 22-6-1989  
Beli/hadiah dari : Proyek IDSN  
Nomor buku : 92 Har d  
Kopi ke : 3

Penyunting

T. Ibrahim Alfian

**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antar para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1986  
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

## **KATA PENGANTAR**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang antara lain mengerjakan penulisan biografi tokoh.

Pengertian "tokoh" dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23/1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga.

Dasar pemikiran penulisan biografi tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga mengejar kepuasan bathiniah, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional di bidang budaya yang bertujuan

menimbulkan perubahan-perubahan yang diarahkan untuk membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Agustus 1986

**PROYEK INVENTARISASI DAN  
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ..	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PENDAHULUAN .....	1
<b>Bab I Masyarakat Tionghoa pada Masa Hidup Jap Tjwan Bing .....</b>	<b>14</b>
<b>Bab II Masa Muda Jap Tjwan Bing .....</b>	<b>10</b>
<b>Bab III Jap Tjwan Bing pada Masa Pendudukan Jepang. .</b>	<b>18</b>
<b>Bab IV Pengabdian Jap Tjwan Bing pada Awal Prokla- masi Sampai Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Tahun 1950 .....</b>	<b>26</b>
4.1 Aktivitas Jap Tjwan Bing dalam Konperensi Indonesia – Tionghoa .....	38
4.2 Aktivitas Jap Tjwan Bing dalam Konperensi Indonesia – Belanda "Peranakan" .....	42

4.3	Aktivitas Jap Tjwan Bing Menentang Pembentukan Negara Pasundan.....	45
4.4	Aktivitas Jap Tjwan Bing dalam Persatuan Tionghoa Indonesia.....	48
4.5	Aktivitas Jap Tjwan Bing sebagai Anggota DPR RIS.....	49
4.6	Aktivitas Jap Tjwan Bing sebagai Anggota DPR Sementara Tahun 1950.....	52
<b>Bab V</b>	<b>Pribadi dan Nilai Perjuangan Jap Tjwan Bing....</b>	<b>58</b>
	DAFTAR PUSTAKA .....	61
	DAFTAR INFORMAN.....	63
	LAMPIRAN .....	65

## PENDAHULUAN

Seorang negarawan Romawi, pernah mengatakan antara lain bahwa bangsa yang tidak mengenal sejarahnya sendiri akan tetap menjadi kanak-kanak untuk selama-lamanya. Sementara itu John Seely berpendapat bahwa studi mengenai sejarah akan menyebabkan orang bijaksana.

Di dalam sejarah dunia dikenal adanya peranan individu-individu tertentu bagi perkembangan sejarah. Demikian pula, dalam sejarah Indonesia dikenal juga adanya peranan individu-individu. Pada periode Perang Kemerdekaan, mulanya muncul beberapa individu yang berhasil memberikan corak tersendiri sebagai anak jamannya. Salah seorang individu yang muncul pada periode tersebut adalah seorang dari golongan peranakan Cina yang bernama Drs. JAP TJWAN BING. Ia adalah seorang sarjana farmasi lulusan Universiteit van Amsterdam tahun 1941. Setelah pulang ke Indonesia ia mengelola sebuah apotik swasta "Sinuaraya" di jalan Cipaganti Bandung pada masa pendudukan Jepang. Di samping bergerak di bidang kewiraswastaan, ia juga aktif terjun ke dunia politik.

Awal kegiatannya di bidang politik dimulai dari Bandung yaitu sebagai Pengurus Pemuda golongan minoritas Cina untuk

menentang penjajahan Jepang. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, ia diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ikut sebagai anggota dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada masa Republik Indonesia Serikat, ia diangkat sebagai anggota DPR RIS mewakili golongan minoritas Cina. Pada tahun 1950, ia menjadi anggota DPR Sementara, tetapi baru tiga tahun menjadi anggota DPRS, ia mengundurkan diri pada tahun 1954.

Tokoh golongan peranakan Cina ini ingin menunjukkan dirinya bahwa ia adalah bangsa Indonesia yang ingin membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun bahan yang dipakai untuk penyusunan naskah ini di dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan dan wawancara. Dalam hal ini penulis banyak menemui kesulitan, karena 30 tahun yang lalu, Drs. Jap Tjwan Ming sudah tidak lagi menjadi warganegara Indonesia. Ia bertempat tinggal di Amerika Serikat. Sampai sekarang penulis belum bisa menemukan keluarganya. Menurut keterangan dari Kedutaan Amerika, Drs. Jap Tjwan Bing telah meninggal dunia.

Naskah ini selesai ditulis berkat bantuan dari berbagai pihak terutama Bapak/Ibu/Saudara :

1. Jenderal (Purnawirawan) A. H. Nasution, Jalan Teuku Umar 41 - 42, Jakarta Pusat.
2. Nyonya A.H. Nasution, Jalan Teuku Umar 41-42, Jakarta Pusat.
3. Sudiro, Jalan Teuku Umar 37, Jakarta Pusat.
4. Wangsawidjaja, Jalan Subang 18, Jakarta.
5. Soebadio Sastrosatomo, Jalan Guntur 49, Jakarta.
6. Prof. Mr. Soenario, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.
7. Otto Rondonuwu, Jakarta.
8. Mr. Teuku Mohammad Hassan, Jakarta.
9. Karkono Partokusumo, Jalan Dr. Sutomo 9A, Yogyakarta.
10. Kesumo (kawan dekat sejak kecil), Jalan P. Senopati Yogyakarta.

11. Sanusi Hardjadinata, Jalan Dr. Setyabudhi 78, Bandung. Kepada beliau-beliau yang sudah berkenan memberi bantuan itu penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, maka tegur sapa dari para pembaca sangat diharapkan, agar di kemudian hari naskah ini dapat disempurnakan.

## **BAB I MASYARAKAT TIONGHOA PADA MASA HIDUP JAP TJWAN BING**

Orang-orang Hokkian adalah orang Cina yang pertama kali bermukim di Indonesia dalam jumlah yang besar, dan mereka merupakan golongan yang terbesar di antara imigran-imigran sampai awal abad XX. daerah asal mereka ialah Fukien Selatan, suatu daerah yang sangat penting menurut catatan sejarah perdagangan luar negeri Tiongkok. Sifat yang kuat dalam hal berdagang yang dimiliki kebudayaan Hokkian selama beberapa abad itu masih nampak jelas di Indonesia. Dibandingkan dengan golongan bahasa lainnya, orang-orang Hokkian itu tidak hanya berkecimpung dalam dunia perdagangan, tetapi mereka juga banyak berhasil di lapangan lain. Orang-orang Hokkian dan keturunannya yang sudah berasimilasi merupakan golongan bahasa Cina terbesar di Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur dan pantai barat Sumatera.<sup>1</sup>

Di Pulau Jawa, orang-orang Cina lebih banyak terdapat di tanah Pasundan Jawa Barat. Pada tahun 1930-an, orang-orang Cina di Jawa sudah banyak yang tinggal di kota-kota. Yang dapat dibagi atas kelompok peranakan dan totok.

Kaum Cina totok lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri dan sebagian besar berkecimpung dalam bidang usaha, sedangkan Peranakan bidang pekerjaannya banyak yang beraneka ragam. Menurut penelitian Giok Lan Tan dalam bukunya yang berjudul *The Chinese Community in a Sundanese Town*, disebutkan bahwa pada awal abad XX di Jawa Barat, kaum Cina totok yang dilahirkan di luar Indonesia ada 80 persen, 57,1 persen dari warganegara Tiongkok yang dilahirkan di Indonesia, dan 44,6 persen kaum peranakan yang menjadi warganegara Indonesia.<sup>2</sup>

Pemilihan bidang pekerjaan ini mencerminkan perbedaaan yang menyolok dalam orientasi nilai. Cina totok lebih menghargai kekayaan, kehematan, kerja, kepercayaan pada diri sendiri dan keberanian, sedangkan kaum Peranakan lebih menghargai penikmatan hidup, waktu senggang, kedudukan sosial dan perasaan terjamin.

Di kota besar atau kecil mana pun di Jawa, kaum totok berkumpul di daerah pusat perdagangan, dengan ciri khas tinggal di rumah-rumah yang merupakan toko dan sekaligus juga tempat tinggal. Sebaliknya, kaum peranakan tersebar lebih luas di seluruh kota dan tinggal di rumah-rumah yang tidak bisa ditinggali saja.

Dalam banyak unsur struktur kekerabatan, kaum peranakan mulai meninggalkan ciri-ciri patrilineal, patrilineal dan patriarkal, yang sebenarnya merupakan dasar sistem tradisional Hokkian dan yang pada umumnya masih merupakan ciri khas yang berlaku di kalangan kaum Cina totok. Dalam bidang keagamaan, kaum peranakan lebih banyak yang beragama kristen karena sekolah-sekolah dikelola oleh lembaga-lembaga Katolik maupun Protestan. Masuknya kaum peranakan menjadi umat Kristen adalah suatu cara untuk mencari keselamatan dan status dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat itu. Pada masa penjajahan, hal itu berarti identifikasi dengan elite yang berkuasa, sedang dalam masa kemerdekaan hal itu berarti

identifikasi dengan satu bagian dari penduduk pribumi yang telah diterima di dalam masyarakat nasional.<sup>3</sup>

Perubahan-perubahan yang terjadi pada awal abad XX itu, telah membuka lebih dari satu jalan menuju modernisasi dan perbaikan sosial yang dituntut oleh pimpinan kaum Peranakan. Jalan yang menggerakkan kaum Peranakan menuju pendidikan Cina dan nasionalisme Cina yang revolusioner telah menimbulkan ketakutan di kalangan orang Belanda dan menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menempuh kebijaksanaan baru. Mulai tahun 1908, kebijaksanaan Belanda yang sebelumnya bersifat eksklusivisme kultural ditinggalkan, dan dengan segera dibukalah sekolah-sekolah Belanda untuk anak-anak kaum peranakan di kota-kota besar dan kecil. Perubahan-perubahan berikutnya terdapat pada sistem hukum Hindia Belanda yang memberikan golongan elite Peranakan suatu status yang lebih dekat kepada status orang Belanda dan orang Indo-Eropa, tetapi lebih jauh dari status penduduk pribumi.

Pada masa pendudukan Jepang, orang Jepang memperlakukan semua sub golongan Cina itu sama rendah dan dengan paksa menyatukan semua organisasi mereka — Pranakan maupun Totok ke dalam satu federasi serbaguna. Selama revolusi dan setelah penyerahan kedaulatan, kaum nasionalis Indonesia tidak banyak memperdulikan tentang perbedaan-perbedaan golongan minoritas Tionghoa.

Selanjutnya dalam dunia perdagangan, pengusaha-pengusaha Cina waktu itu banyak menggunakan apa yang dinamakan "kredit importir" yang biasanya diperoleh dari para penyalur mereka tanpa bunga. Di kota-kota kecil di Jawa pengusaha Cina juga mengusahakan pemborongan hasil-hasil produksi pribumi, seperti beras, jagung, kopra, kacang tanah, kopi, dan lain-lain dan juga hasil-hasil kerajinan tangan seperti batik, keranjang, dan lain-lain.

Dalam perdagangan tembakau, pemborong-pemborong Cina banyak yang pergi ke Karisedanan Kedu dengan Magelang,

Temanggung dan Wonosobo sebagai pusat perdagangan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Solo dan Yogya dilakukan suatu perdagangan keperluan dalam negeri seperti beras, kopi, kopra dan lain-lain. Di samping itu juga ada perdagangan yang ramai di bidang barang-barang klontong, cerutu, rokok, batik, dan buah-buahan dalam kaleng dari Tiongkok.

Perdagangan klontong biasanya dilakukan bersamaan dengan pemberian kredit kepada pembeli pribumi, yaitu menjual barang atas dasar kredit atau pun meminjamkan uang kontan, lepas dari soal jual beli. Kadang-kadang terjadi hal yang aneh, sehingga orang tidak dapat membedakan apakah di sini terjadi perjanjian beli atau pinjam uang. Sebagai akibat hubungan kredit inilah kadang-kadang penjual-penjual klontong cina mendapat nama jelek di kalangan penduduk desa, karena kredit yang diberikan biasanya tinggi bunganya, sehingga pedagang-pedagang klontong yang juga dinamakan *Cina Mindring* atau *tukang mindring* itu dianggap lintah darat. Meskipun tarif lebih tinggi, pemberi kredit Cina lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan bank-bank kredit rakyat yang resmi. Hal ini disebabkan karena keluwesannya dan hubungan pribadinya. Demikianlah pernyataan Van Gelderen dalam bukunya *Voorlezingen over Propisch-Koloniale Staatshuishoudkunde*.<sup>4</sup>

Akibat keluwesan dalam memberikan fasilitas itu, maka si peminjam kedudukannya menjadi tergantung kepada si pemberi kredit. Orang tidak usah menunggu lama untuk memperoleh uang yang akan dipinjam karena si *tukang mindring* segera memberikannya atau paling lambat keesokan harinya, sedangkan syarat-syaratnya, seperti juga cicilan untuk melunasinya, ditentukan menurut apa yang paling baik bagi masing-masing peminjam. Dalam hal ini tidak ada perantara dan gangguan administrasi yang berbelit-belit. Van Gutem dalam artikelnya *Cina Mindring*, mengatakan sebagai berikut : "Tidak adanya perantara dan gangguan administrasi memberikan keuntungan yaitu pem-

batasan ongkos-ongkos usaha yang serendah-rendahnya. Dalam praktek ongkos-ongkos tidak ada. Satu-satunya hal yang penting yang tidak dapat diabaikan ialah badan yang sehat dan ulet, buku catatan kecil dan sebuah pensil".<sup>5</sup>

Pekerjaan tanpa perantara selain menjamin usaha yang murah, juga kerahasiaan. Cara-cara seperti inilah yang menyebabkan orang Indonesia mengambil pinjaman dari orang-orang *mindring*, karena yang penting bagi yang membutuhkan kredit-kredit yang berjumlah kecil adalah untuk secepat dan semudah mungkin mendapat jumlah yang diinginkan.

## CATATAN

1. G. William Skinner, "The Chinese Minority", dalam Ruth T McVey (ed.), *Indonesia* (New Haven, Connecticut: HRAF Press, 1963). Hlm. 97 – 118.
2. Giok Lan Tan, *The Chinese Community in a Sundanese Town* (Thesis Unpublished, Cornell University, 1961), hlm. 53.
3. *Ibid.*
4. Van Gelderan, *Voorlezingen over Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde* (Harlem, 1927), hlm. 70. Lihat juga, V.B. van Gutem, "Tjina Mindring", *Koloniale Studien*, 1919), hlm. 128.
5. Van Gutem, *Ibid.*, hlm. 132.

## BAB II MASA MUDA JAP TJWAN BING

Jap Tjwan Bing dilahirkan tahun 1910 di kota Solo. Ia dilahirkan dari keluarga yang beragama Kristen. Ayahnya bernama Jap Tjoen Sing, seorang pengusaha swasta.

Ketika usia sekolah tiba, pada tahun 1921 Jap Tjwan Bing masuk sekolah dasar *Hollands Chineesche School* di Solo. Di sekolah dasar ini ia sangat menyukai ilmu berhitung dan cerita-cerita tentang tokoh pergerakan nasional. Di samping itu ia mempunyai hobby/kegemaran bermain bola. Di sekolah dasar ini ia sangat nakal, sepulang sekolah kerjanya main bola. Selama satu minggu, empat hari diisinya untuk bermain sepak bola. Suatu keistimewaannya adalah kawan-kawannya banyak orang Jawa. Ia sangat senang bergaul dengan orang-orang pribumi, walaupun sebagian dari keluarganya tidak menginginkannya banyak bergaul dengan orang-orang Jawa. Suatu hari, karena permintaan untuk bermain bola dilarang oleh ayahnya, ia menangis dan mengatakan kepada ayahnya, "dasar keluarga cina". Teman-temannya yang mendengar kata-kata itu merasa geli. Seorang temannya menceritakan hal itu sebagai berikut. Tidak beda dengan ayah dan ibunya, sang anak juga sangat jelas memiliki ciri-ciri sebagai keturunan Cina, tetapi mengapa ia memaki

ayahnya sebagai Cina? Tidak sadarkah ia bahwa dirinya juga Cina? Betapa lucunya peristiwa yang memayungi kehidupan keluarga Jap Tjwan Bing.<sup>1</sup> Ayah dan ibunya barangkali sudah menyadari dan tahu pasti bahwa bahasa makian anaknya itu diperoleh dari buah pergaulannya dengan kawan-kawannya orang pribumi.

Suatu peristiwa yang cukup menarik lagi menurut kawan dekatnya adalah ketika kawan dekatnya berkunjung ke rumahnya, di jalan Kepunton Solo. Di halaman rumahnya ada beberapa pohon yang cukup besar. Waktu itu suasana kota Solo dilipti oleh awan yang tebal dan beberapa menit kemudian mulailah hujan rintik-rintik. Kawan-kawannya melihat Jap memanjat pohon mau mengambil buah mangga. Karena hujan pohon yang dipanjatnya sangat licin. Ia terpeleset dan jatuh membentur tanah. Suara itu cukup mengagetkan ibu dan ayahnya. Pada waktu akan ditolong, anak tersebut sudah berdiri kembali dan tidak menangis. Ayahnya membentak, "Anak bandel gerimis-gerimis naik pohon mangga, dasar anak Cina". Kawan-kawan Jap yang sebagian besar orang Jawa yang mendengar ucapan ayahnya itu merasa geli, karena mereka tahu bukan hanya bapaknya, ibunya pun juga orang cina yang masih jelas membawa ciri-ciri fisik cina dengan mata yang sipit, kulit yang kuning, rambut yang tidak terlalu hitam.<sup>2</sup>

Suasana kehidupan kota Solo waktu itu belum ramai. Suasana kerajaan dengan ciri-ciri feodal masih nampak. Tidak ada bahaya kecelakaan lalu lintas yang mencemaskan hati orang-orang tua. Sepeda dan dokar lebih banyak mendominasi jalan-jalan di kota kecil itu. Satu-satunya pusat berkumpul bagi anak-anak muda dan remaja waktu itu adalah sekolah. Tidak ada tempat lain di luar sekolah yang menarik bagi Jap dan teman-temannya, kecuali lapangan bola. Jap dan teman-temannya bermain bola mulai pukul 15.00 sampai pukul 17.00. Yang kadang-kadang diakhiri dengan suatu perkelahian di atas rumput yang hijau itu. Di samping itu, jika hari minggu, ia sering pergi ke

sawah bersama kawan-kawannya di pinggir kota yang masih sepi itu, di sekitar sungai Bengawan Solo. Ia bersama-sama dengan kawan-kawannya ia berlari-lari di sepanjang pematang yang membingkai rumpun padi luas menghijau berkotak-kotak, berebut menangkap belalang yang terbang terhalau tingkah laku mereka, berteriak dan sembunyi di balik rumpun padi, atau berlembar-lembaran tanah dari kejauhan.

Kadang-kadang Jap dan kawan-kawannya berlari-lari berebut menaiki gubug tua yang reot, bertiduran di atas sambil berteduh dari sengatan sinar matahari, menarik-narik tali yang merentang jauh ke tengah hamparan sawah yang bertabur buah padi menguning keemasan. Di kejauhan tampak ujung-ujung tali terikat pada batang-batang bambu yang tertancap di tengah petak sawah, berkepala buah kelapa kosong, berbaju rombeng dengan tangan-tangan terentang, serta berkelung kaleng-kaleng bekas berisi batu-batu kerikil. Bergemalah hiruk pikuk suara kaleng ketika tangannya meraih tali penggerak, membahana di tengah kesunyian rumpun-rumpun padi. Dari kejauhan tampak ratusan burung gelatik dan emprit menyembul ke udara seperti debu tertiuap mobil yang berjalan kencang.

Apabila matahari mulai condong ke barat, Jap dan kawan-kawannya berbondong menuju ke tepi sungai Bengawan Solo yang berumput hijau dan lebat. Di sana teman-teman penggembala tengah asyik di atas punggung kerbau terkantuk-kantuk tengkurap mengikuti gerak kerbaunya yang sedang merumput. Jap dan kawan-kawannya berebut bergantian menaikinya. Yang tidak kebagian mulai melepas bajunya dan lari ke tepi sungai, meloncat dan menyelam sambil berteriak-teriak, atau berbaring beristirahat di antara batu-batu. Apabila turun hujan, ia pun tak perlu terburu-buru lari menghindarinya. Hujan bagi Jap dan kawan-kawannya adalah pelengkap bagi puncaknya kegembiraan. Percikan air sungai dan titik-titik air hujan yang disembur angin di tengah alam yang bebas itu dirasakan sebagai belaian alam yang membekas basah pada seluruh tubuhnya.

Jika di antara mereka tiba-tiba ada yang terasa punya hajat untuk membuang air besar, ia lari sendiri menuju ke arah sungai bertengger di atas batu. Kotoran dibiarkan hanyut, menjauh ke muara, kemudian membersihkan diri dengan air sungai, tanpa sabun.

Demikianlah kenang-kenangan masa lampau mereka masa-masa percumbuan pertama dengan alam dengan tanah kelahiran, yang memberikan arti lebih besar setelah menjadi kenangan, setelah menyatu dengan jiwa dan membentuk kepribadian serta budaya. Jap dan kawan-kawannya yang kebanyakan orang Jawa mempunyai perasaan yang sama, rasa cinta kepada alam dan lingkungannya, rasa cinta kepada masa lalu dan kenang-kenangannya. Perasaan-perasaan seperti itu semakin lebih berarti setelah ia semakin menginjak dewasa, setelah merasakan liku-liku kehidupan dan banyak bertanya tentang arti hidup.

Pendidikan dasar Jap Tjwan Bing diselesaikan pada tahun 1927, kemudian dilanjutkan ke *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO). Perlu diketahui bahwa MULO merupakan kelanjutan dari HIS atau HCS. Sebenarnya sejak tahun 1903 di beberapa sekolah rendah Belanda dibuka kursus MULO, yang memberi pengajaran lanjutan. Lama belajarnya mula-mula ditetapkan dua tahun, kemudian diubah menjadi tiga tahun. Kursus ini, sebagai lanjutan sekolah rendah Belanda hanya boleh dikunjungi oleh anak-anak Belanda saja. Setelah kursus itu pada tahun 1914 diubah menjadi sekolah MULO, maka sekolah tersebut berdiri sendiri, lepas dari sekolah rendah Belanda. Reorganisasi ini mengakibatkan dua perubahan penting yaitu :

1. Kalau semula kursus itu hanya untuk anak-anak Belanda saja, maka kini juga terbuka bagi anak-anak Indonesia yang telah menamatkan HIS maupun HCS.
2. Kursus MULO hanya merupakan lanjutan dari sekolah rendah Belanda, yang diubah tujuannya menjadi dua yaitu, pertama *onderbouw* (tingkatan bawah) sekolah-sekolah

kejuruan menengah, dan kedua *onderbouw* pengajaran menengah.<sup>3</sup>

Seperti waktu belajar di HCS, di MULO pun Jap Tjwan Bing menunjukkan prestasi yang baik, meskipun belum pernah menjadi juara. Bermain bola masih tetap disenanginya. Menjelang ujian akhir di sekolah MULO ini, ia pernah berkelahi dengan orang-orang Belanda karena dihina ketika bermain bola.

Setelah lulus dari MULO, Jap Tjwan Bing melanjutkan ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) Yogyakarta. AMS merupakan kelanjutan dari MULO dan mengantarkan pemuda-pemuda Indonesia ke perguruan tinggi. Lama belajar tiga tahun. AMS dibagi menjadi dua bagian, yaitu : Bagian A, termasuk Ilmu Pengetahuan Kebudayaan, sedang Bagian B termasuk Ilmu Pengetahuan Alam. Bagian A masih dibagi lagi yaitu, bagian A1 mengenai kesusasteraan Timur. Meskipun bahasa pengantar adalah bahasa Belanda, tetapi mata pelajaran pokok meliputi bahasa Jawa, bahasa Melayu, Sejarah Indonesia, Ilmu Bangsa-Bangsa. Bagian A2 mengenai klasik Barat. Mata pelajaran pokok adalah bahasa Latin.<sup>4</sup>

Di AMS Yogyakarta, Jap Tjwan Bing masuk bagian B. Semenjak di Yogyakarta itu, Jap Tjwan Bing mulai merasakan adanya rasa cinta tanah air, karena ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh yang tergabung perkumpulan Indonesia Muda yang merupakan peleburan dari organisasi Jong Java, Pemuda Indonesia, Pemuda Sumatera, Jong Celebes dan Sekar Rukun. Asas Indonesia Muda adalah kebangsaan dan tujuannya adalah Indonesia Raya.

Sebagai peranakan Cina, ia cukup luwes dalam pergaulan bahkan kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa dan dengan lingkungan masyarakat Yogyakarta. Ia juga bisa tertawa pada apa saja yang bisa membuat teman-teman pribumi atau Jawa tertawa, bahkan apabila hal itu mengenai kebiasaan yang khusus pada orang-orang Cina sekalipun. Ia dapat merasakan apa yang dirasakan teman sebayanya anak-anak pribumi, karena ia telah

menjadi satu dengan mereka dalam perasaan dan penilaian terhadap sesuatu yang terdapat pada lingkungannya, sehingga ia sudah tidak lagi seorang Cina dalam arti seluruh jiwa raganya, melainkan ia sudah seorang Indonesia, walaupun berkulit kuning dan bermata sipit.

A. H. Nasution dan Sanusi Hardjadinata mengatakan bahwa orang seperti Jap Tjwan Bing adalah orang yang mendambakan terwujudnya kesatuan bangsa tanpa melihat asal-usul rasnya, melainkan atas dasar pengabdianya terhadap nusa dan bangsa. Begitulah pernyataan beliau sebagai kawan dekat pada periode Perang Kemerdekaan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, akibat pergaulannya dengan orang-orang pribumi akhirnya Jap banyak menyukai masakan-masakan Jawa. Jap lebih senang makan masakan sayur-sayuran ala Jawa.<sup>5</sup>

Setelah menyelesaikan studinya di AMS bagian B Yogyakarta tahun 1935. Jap melanjutkan studinya ke luar negeri, yaitu Negeri Belanda, dan mengambil jurusan farmasi (ilmu obat-obatan) pada Universiteit van Amsterdam. Di Negeri Belanda ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, Anwar Tjokroaminoto dan lain-lain, sehingga banyak pikiran-pikiran tokoh tersebut mewarnai kehidupannya.<sup>6</sup>

Setelah Jap Tjwan Bing meraih gelar sarjana farmasi, hatinya tergerak untuk segera pulang ke tanah kelahirannya yaitu Indonesia. Hati, pikiran, dan jiwanya terasa sudah terikat dengan tanah kelahirannya, tanah yang telah menggerakkan denyut jantungnya, tanah yang telah membangkitkan cita-cita dan harapan. Ia pulang ke Indoesia menjelang masa pendudukan Jepang. Kemudian ia bersama-sama dengan kawan-kawannya yang bergerak di bidang wiraswasta mendirikan sebuah apotik di jalan Cipaganti No. 23 (Nijland-Weg) Bandung. Apotik tersebut diberi nama "Apotik Suniaraya".<sup>7</sup> Baru beberapa bulan ia mengelola apotik, Jap tertarik pada seorang gadis peranakan Cina asal Madiun yang bernama Nyoo Tier Nio.<sup>8</sup> Gadis tersebut

berasal dari lingkungan keluarga yang beragama Kristen. Akhirnya pernikahan berlangsung dan istrinya diboyong ke Bandung. Mereka bersama-sama mengelola apotik yang baru berdiri itu. Dari hasil perkawinannya, ia dikaruniai dua orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Perlu diketahui bahwa 30 tahun yang lalu Jap Tjwan Bing meninggalkan Indonesia dan menjadi warganegara Amerika Serikat. Menurut keterangan dari Kedutaan Amerika, ia telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Alamat terakhir di 900 South 4th Street Ap. D Alhambra California 91801, U.S.A.

## CATATAN

1. Wawancara dengan Kesumo, tanggal 1 Agustus 1985, di rumahnya Jalan P Senopati, Yogyakarta.
2. Wawancara Kesumo dan istrinya, tanggal 3 Agustus 1985, di rumahnya Jalan P. Senopati, Yogyakarta.
3. H. Danasuparta & I Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: C.V. Ilmu, 1976), hlm. 135.
4. *Ibid*
5. Wawancara dengan Sanusi Hardjadinata, 6 Agustus 1985, di rumahnya jalan Dr. Setyabudhi 78, Bandung; Wawancara dengan A. H. Nasution, tanggal 18 Juli 1985, di rumahnya Jalan Teuku Umar, No. 41 – 42, Jakarta Pusat.
6. Wawancara dengan Sudiro, tanggal 18 Juli 1985 di rumahnya Jalan Teuku Umar 97, Jakarta Pusat. Wawancara dengan Wangsawidjaja, tanggal 17 Juli 1985 di rumahnya jalan Subang 18 Jakarta.
7. Wawancara dengan Nyonya A.H. Nasution, tanggal 18 Juli 1985 di rumahnya Jalan Teuku Umar 41–42, Jakarta Pusat.
8. Wawancara dengan Kesumo, tanggal 1 Agustus 1985 di rumahnya Jalan P. Senopati Yogyakarta; Wawancara dengan Karkono Partokusumo, tanggal 10 Agustus 1985, di rumahnya Jalan Dr. Sutomo 9A, Yogyakarta.

### **BAB III JAP TJWAN BING PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG**

Pada tanggal 1 Maret 1942 sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di tiga tempat di Pulau Jawa yaitu Banten, Indramayu, Rembang, masing-masing dengan kekuatan lebih kurang satu divisi. Empat hari setelah pendaratan, Jakarta dengan resmi menyerah. Dalam gerakan ini Jepang tidak banyak perlawanan dan hambatan, hanya dijumpai beberapa rintangan berupa jembatan-jembatan yang dirusak.

Bagian yang mendarat di Rembang satu kolone bergerak ke Jawa Tengah yang segera merebut Semarang, Magelang, Solo, Yogya dan bagian lain terus mengejar tenaga induk Divisi II dan KNIL ke jurusan Priangan. Waktu itu Jap Tjwan Bing berada di Priangan, sehingga ia mengetahui dengan jelas strategi yang dijalankan oleh pihak Jepang dalam menghantam tentara Belanda.<sup>1</sup> Peperangan antara pihak Belanda dengan Jepang ini berlangsung amat cepat. Di mana-mana boleh dikatakan hampir tidak ada perlawanan yang berarti. Di darat tiga divisi KNIL menyerah hanya dalam tempo seminggu saja. Politik bumi hangus yang dijalankan oleh pihak Belanda boleh dikatakan dapat mencapai

tujuannya, akan tetapi perang gerilya di Pulau Jawa mengalami kegagalan. Gerilya dimaksudkan untuk mengganggu dan mengikat pasukan musuh dimanapun juga dan hanya mungkin berhasil bila ada bantuan rakyat, tetapi rakyat Indonesia enggan membantu Belanda.

Sebagai akibat perasaan anti terhadap penjajahan Belanda dan kejituan perang psikologis Jepang, maka rakyat Indonesia menerima bala tentara Jepang sebagai saudara-saudaranya yang akan menghantarkannya kepada cita-cita kebangsaan yang telah lama dicita-citakan bahkan didambakan. Beberapa pemimpin seperti antara lain Abikusno, telah merencanakan suatu susunan kabinet Indonesia yang pertama. Dalam rencana itu, Abikusno menjadi Perdana Menteri dan Bung Karno menjadi Menteri Pekerjaan Umum, Bung Hatta menjadi Menteri Perekonomian. Banyak pemimpin berlomba-lomba menyediakan tenaga dan bantuan kepada "saudara tua". Rakyat bergembira dan di mana-mana prajurit Jepang diterima dengan baik. Orang ramai belajar bahasa Jepang. Ada yang mengira bahwa huruf latin akan diganti oleh huruf kanji Jepang, bahkan sebagian rakyat Indonesia ada yang berpendapat bahwa Jepang adalah kerajaan yang terkuat di dunia yang tak bisa dikalahkan. Anak-anak banyak yang mengerumuni prajurit-prajurit Jepang yang ramah-ramah, sangat berbeda sekali dengan serdadu-serdadu kompeni yang sangat ditakuti.<sup>2</sup>

Akan tetapi lambat laun orang-orang Indonesia mulai sadar bahwa tentara Jepang itu lain daripada yang diduga semula. Pada hakekatnya tidak terjadi perubahan yang pokok terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia. Partai-partai politik semuanya dibubarkan. Hal ini dipatuhi oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Surat kabar-surat kabar Indonesia dihentikan terbitnya dan digantikan dengan koran-koran Jepang. Kebebasan di bawah kekuasaan Jepang terbukti tidak ada. Segala sesuatunya diambil alih dan dikuasai oleh pemerintah Jepang. Indonesia digenggam langsung secara totaliter oleh tangan besi balatentara Jepang.

Rakyat Indonesia mengalami segala sesuatu yang pernah dibaca dan didengarnya tentang fasisme.

Dengan demikian ada dua macam tujuan yaitu, di satu pihak Jepang bertujuan untuk memobilisasikan seluruh Asia Timur untuk ikhtiar perang Dai Toa dan mewujudkan daerah kemakmuran bersama Asia Timur Raya sesuai dengan pengertian dan tafsiran Jepang. Di lain pihak, terdapat tujuan bangsa Indonesia yang hendak mengusir penjajahan, mengusir imperialisisme. Bangsa Indonesia hendak mencapai kemerdekaan nasionalnya. Pada awalnya, kedua tujuan itu seolah-olah searah. Jepang yang hendak membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, dan Indonesia yang dengan gembira membantu Jepang untuk mengusir kaum kolonial Barat dari Asia Tenggara. Akan tetapi kekecewaan pada kedua belah pihak segera bangkit dan semakin memupuk kecurigaan dan dendam. Apalagi dalam usahanya untuk melancarkan jalannya roda peperangan, pihak Jepang banyak mengerahkan tenaga-tenaga *romusha* untuk keperluan pertahanannya dan kemudian dengan paksa membeli bahan makanan persediaan rakyat. Tindakan kepolisian yang mereka jalankan sangat keras. Banyak penangkapan dan penganiayaan yang sewenang-wenang oleh Jepang serta kaki tangannya. Kekejaman tindakan polisi Jepang telah menimbulkan luka parah dalam hati sanubari rakyat Indonesia. Anak-anak sekolah digundul dan sering dipukul kepalanya. Suatu hal yang merupakan penghinaan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Bahasa Jepang dipaksakan, semangat Jepang ditanamkan, *Seikeirei* ke Tokyo diperintahkan sebagai sembah. Tindakan-tindakan demikian itu sangat dirasakan sebagai menghilangkan kebangsaan Indonesia dan hendak men-Jepang-kannya. Maka di kalangan pemuda sekolah timbullah komplotan-komplotan kecil yang terbatas. Akibatnya, terjadilah penangkapan-penangkapan pelajar-pelajar di Bandung, Jakarta, Semarang, Yogya dan kota-kota lainnya. Beberapa pemimpin seperti Syahrir, Tan Malaka, dan Mr. Amir Sjarifuddin bergerak di bawah tanah.

Sementara itu kelompok-kelompok pemuda mulai mempersiapkan diri buat melancarkan pemberontakan bersenjata. Di kalangan pemuda dewasa itu, lebih-lebih dalam barisan-barisan yang memperoleh latihan militer, makin lama makin bangkit semangat untuk memberontak. Jap Tjwan Bing dipilih sebagai ketua pemuda golongan peranakan Cina dan mengikat tali persaudaraan dengan pemuda-pemuda pribumi/Jawa Barat lainnya untuk menentang Jepang.<sup>3</sup> Jiwa memberontak timbul di kalangan pemuda, karena suah tidak tahan lagi menderita penindasan yang melebihi batas-batas peri kemanusiaan. Selanjutnya para pemuda berkeinginan untuk segera mendapat wadah yang dapat mempersatukan meeka agar mereka dapat bersama-sama bergerak untuk mencapai cita-cita bersama yaitu kemerdekaan tanah airnya. Sementara itu, untuk mematangkan pikiran anggota masyarakatnya, khususnya para pemudanya, diupayakan segera bersatu di bawah satu pimpinan.

Sejalan dengan anjuran agar para pemuda Indonesia segera bersatu, maka dalam bulan Mei 1945 para pemuda berkumpul di gedung Asia Raya di Jalan Hayam Wuruk Jakarta. Akan tetapi dalam pertemuan itu keputusan yang tegas belum dapat diambil, karena yang hadir di dalamnya tidak membawa surat kuasa dari organisasinya masing-masing. Dalam pertemuan itu sikap saling mencurigai masih sangat terasa, karena di antara yang hadir tidak semuanya anti Jepang. Walaupun demikian, pertemuan itu juga membawa hasil, yaitu suatu keputusan bahwa dalam bulan Juni 1945 akan diadakan rapat yang bersifat resmi untuk menentukan sikap.<sup>4</sup>

Berdasarkan keputusan rapat yang berlangsung pada bulan Mei 1945, maka pada tanggal 3 Juni 1945 berlangsung rapat pemuda di gedung Hokookai kota Jakarta, yaitu di jalan Gambir Selatan No. 6. Pertemuan atau rapat itu tidak dihadiri oleh wakil Jepang.

Dalam rapat yang amat bersejarah itu, Jap Tjwan Bing hadir. Selain itu, juga hadir tokoh-tokoh pergerakan sejak jaman

Belanda, misalnya Mohammad Roem, S.K. Trimurti, Pandu Kartawiguna, B.M. Diah, Khaerul Saleh, Sitorus dan masih banyak lagi. Jap Tjwan Bing bersama-sama dengan tokoh-tokoh pemuda berusaha mencari konsensus bersama agar dapat dipakai sebagai tempat berpijak atau landasan gerakan mereka. Sebagian tempat berpijak atau landasan gerakan mereka. Sebagian pemuda sempat terkejut ketika Jap Tjwan Bing mengutarakan pendapatnya, bahwa para pemuda perlu mempunyai kekuasaan politik agar dapat melaksanakan cita-citanya yaitu mencapai kemerdekaan tanah airnya secepatnya dengan kekuatan sendiri.<sup>5</sup> Demikianlah suara seorang sarjana farmasi lulusan Amsterdam, Negeri Belanda, Mengapa ia punya ide demikian? Pertanyaan ini dapat kita jawab mengingat waktu ia kuliah di negeri Belanda sudah banyak bergaul dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Ide-ide dari tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia rupanya sangat meresap di hati sanubarinya.

Rapat yang diselenggarakan oleh para pemuda tanggal 3 Juni 1945 itu akhirnya berhasil mengambil keputusan penting, yaitu bahwa mereka akan mengadakan suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Angkatan Baru Indonesia. Agar anggaran dasar dan program kerja dapat dirumuskan dengan baik, maka rapat tersebut membentuk sebuah panitia yang terdiri atas : B.M. Diah (Wartawan), Sukarni (Angkatan Muda), Sudiro (Barisan Pelopor), Sjarif Thayeb (Mahasiswa), Harsono Tjokroaminoto (Pemuda Islam), Wikana (Kaigun Bukanfu), Chaerul Saleh (Angkatan Muda), Gultom (Seinendan), Supeno (Baperdi), dan Asmara Hadi (Barisan Pelopor).<sup>6</sup>

Menurut anggaran dasar Angkatan Baru Indonesia, maksud dan tujuan gerakan tersebut adalah mempersiapkan dan menyediakan tenaga angkatan baru Indonesia untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dengan sengaja diketengahkan dalam perumusan tersebut, sebab dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, masalah bentuk dan susunan negara

masih menjadi bahan perdebatan. Dalam hal bentuk, ada yang memilih republik, ada yang memilih kerajaan, ada yang memilih federasi, dan ada yang memilih kesatuan. Usaha yang akan dilahirkan oleh gerakan itu adalah : pertama, memusatkan tenaga Angkatan Baru Indonesia dalam satu ikatan kokoh; kedua, memberi pendidikan, petunjuk, pimpinan dan pengorbanan kepada rakyat di dalam melaksanakan cita-citanya.<sup>7</sup>

Sementara itu pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengucapkan pidatonya di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pidato tersebut kemudian terkenal dengan nama Lahirnya Pancasila, dengan materi dan nama Pancasila sekaligus dicetuskan di dalam pidatonya.

Adapun materi Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, atau peri kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima dasar itu oleh Bung Karno dinamai Pancasila.

Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan orang anggota Badan Penyelidik yang terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso mengadakan rapat. Rapat tersebut menghasilkan sebuah dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta.<sup>8</sup>

Angkatan Baru Indonesia yang sebagian besar anggotanya pemuda ditambah tokoh-tokoh tua yang tergabung dalam Badan Penyelidik, telah memberi gambaran kepada kita bahwa masyarakat Indonesia pada masa itu sudah mempunyai tekad untuk mengubah keadaan. Hal seperti ini sudah barang tentu sangat menggelisahkan pihak Jepang. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 1945 Saiko Syikikan menyatakan persetujuannya mengenai pembentukan apa yang disebut "Gerakan Rakyat Baru" Akan tetapi, ketika berlangsung rapat Gerakan Rakyat Baru

pada tanggal 6 Juli 1945, salah seorang pemuda, yaitu Chaerul Saleh berpidato secara lantang dan terang-terangan menentang kebijaksanaan politik penguasa Jepang yang mendapat komando dari Tokyo. Sebagai akibat pidato tersebut, beberapa tokoh pemuda yang hadir di situ meninggalkan sidang, karena membawa risiko yang amat berat. Kemudian ketika Gerakan Rakyat Baru diresmikan pembentukannya pada tanggal 23 Juli 1945 yang juga menggabungkan Hokookai dan Masyumi menjadi satu, tidak seorang pun pemuda radikal bersedia menduduki kursi yang disediakan bagi mereka.<sup>9</sup>

Dengan adanya para pemuda yang bersikap radikal itu, maka terasa adanya perbedaan pendapat antara kaum tua dan kaum muda. Walaupun demikian, sebenarnya pada masa itu masih ada titik-titik persamaan pendapat antara kedua golongan tersebut. Kedua golongan tersebut sependapat bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Hanya dalam cara mengemukakan pendapat mereka nampak berbeda. Kaum tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada peranan yang dapat dimainkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 7 Agustus 1945.

## CATATAN

1. Wawancara dengan Sanusi Hardjadinata, tanggal 6 Agustus 1985, di rumahnya Jalan Dr. Setyabudhi 78, Bandung; Wawancara dengan Otto Rondonuwu, tanggal 19 Juli 1985 di rumahnya Jalan Cilacap, Jakarta Pusat.
2. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I (Bandung: Disjarah AD & Penerbit Angkasa, 1978), hlm.
3. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo, 6 Agustus 1985, di rumahnya Jalan Guntur, Jakarta.
4. Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), hlm 135.
5. Wawancara dengan Sudiro, tanggal 8 Agustus 1985, di rumahnya Jalan Teuku Umar 97, Jakarta Pusat.
6. Khalid Rasyid, *Pengalaman Perjuangan Jaman Jepang sampai Proklamasi* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), hlm. 23.
7. *Ibid*
8. Sartono Kartodirdjo, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 18-24.
9. Khalid Rasyidi, *op. cit.* hlm. 24.

#### **BAB IV PENGABDIAN JAP TJWAN BING PADA AWAL PROKLAMASI SAMPAI TERBENTUKNYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEMENTARA 1950**

Kedudukan Jepang terus menerus menjadi semakin terdesak. Komando tentara Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945 setahun setelah pernyataan Koiso. Dalam bulan Agustus perubahan bertambah cepat. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritzu Zyumbi Iinkai* yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Anggota PPKI seluruhnya terdiri dari 21 orang tokoh-tokoh perjuangan nasional dari berbagai daerah/golongan sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. K.R.T. dr. Radjiman Wedyodiningrat
4. Prof. Mr. Dr. Soepomo

5. Pangeran Purboyo
6. K.H. Wachid Hasjim
7. Dr. Moh. Amir
8. Drs. Jap Tjwan Bing ✓
9. Mr. Teuku Mohamad Hassan
10. Mr. J. Latuharhary
11. Mr. I Gusti Ktut Pudja
12. A.A. Hamidan
13. Otto Iskandar Dinata
14. Abdul Kadir
15. R. Pandji Suroso
16. M. Sutardjo Kartohadikusumo
17. Pangeran Surjohamidjojo
18. Ki Bagus Hadikusumo
19. Mr. Abdul Abbas
20. Dr. G.S.S. Ratulangi
21. Andi Pangeran.

Selanjutnya enam orang anggota yang ditambahkan ialah:

1. R.A.A. Wiranatakusumah
2. Ki Hadjar Dewantara
3. Mr. Kasman Singodimedjo
4. Sajuti Melik
5. Mr. Iwa Kusuma Sumantri
6. Mr. A. Subardjo.

PPKI secara simbolis dilantik oleh Jenderal Terauchi dengan mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat. Dalam pidato pelantikannya Terauchi menerangkan bahwa cepat atau lambat kemerdekaan bisa diberikan, tergantung kepada kerja PPKI. Namun perkembangan cepat terjadi setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki masing-masing pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dalam pertemuannya Terauchi dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang diselenggarakan di Saigon pada tanggal 11 Agustus 1945, Terauchi menentukan tanggal pemberian kemerdekaan.

Setelah dilantik Soekarno dan Hatta pulang ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945 melalui Singapura dan berjumpa dengan anggota-anggota PPKI yaitu Jap Tjwan Bing, Moh. Amir, Teuku Moh. Hasan, dan Abdul Abbas. Jap Tjwan Bing pada waktu itu sedang mengurus kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan apotiknya. Perlu diketahui bahwa di samping sebagai anggota PPKI, Jap Tjwan Bing juga bergerak dalam pemasaran obat-obatan sesuai dengan jabatan sebagai direktur apotik Suniaraya di Jalan Cipaganti Bandung, dan sebagai seorang sarjana farmasi. Banyak yang bersimpati terhadap Jap Tjwan Bing sebagai wakil dari kelompok minoritas Tionghoa karena jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini ditunjukkan ketika ia diangkat sebagai Ketua Kelompok Pemuda Priangan. Demikianlah kata istri A. H. Nasution yang pernah menjadi pegawai apotik Sinuaraya pada tahun 1942/1943.<sup>3</sup>

Segera setelah Soekarno-Hatta tiba di Jakarta, Syahrir menemui mereka untuk saling tukar informasi. Syahrir yang memimpin gerakan perlawanan tanpa kompromi dengan Jepang, mengetahui bahwa Jepang telah minta damai dengan sekutu. Namun rupa-rupanya pihak sekutu hanya mau menerima penyerahan tanpa syarat. Syahrir mendesak agar kedua pemimpin itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya yaitu tanggal 15 Agustus 1945. Maksudnya kalau proklamasi kemerdekaan itu terjadi sebelum Jepang menyerah, maka kedudukan Indonesia di dalam perundingan-perundingan sesudah perang selesai akan menjadi lebih kuat karena jelas kemerdekaan itu bukan hadiah Jepang. Disamping itu proklamasi itu berarti pula sumbangan Indonesia kepada sekutu melawan Jepang. Golongan Pemuda termasuk pula kelompok pemuda Priangan di bawah pimpinan Jap Tjwan Bing yang merasa tidak bisa mengabaikan Soekarno-Hatta juga mendesak supaya proklamasi kemerdekaan dan perebutan kekuasaan segera dilakukan.<sup>4</sup> Ketidaksabaran mereka mendorong mereka menngancam Soekarno. Namun Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa Jepang defacto masih kuasa, karena itu sikap hati-hati

agar tujuan perjuangan dapat dicapai tanpa banyak pengorbanan yang tidak perlu harus dipegang teguh. Soekarno dan Hatta menginsyafkan para pemuda bahwa musuh mereka bukan lagi Jepang, tetapi Belanda yang pasti segera akan datang sesudah Jepang menyerah.<sup>5</sup>

Sementara itu pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 terjadi dua hal penting, yaitu persiapan rapat PPKI dan rapat Gerakan Pemuda. Setelah Jepang diberitakan menyerah, PPKI akan mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus pagi. Undangan kilat telah disampaikan kepada para anggota yang pada waktu itu telah berkumpul di Jakarta. Rapat diadakan di Hotel Des Indes (Duta Indonesia).<sup>6</sup>

Bersamaan dengan itu, Gerakan Pemuda mengadakan rapat di bawah pimpinan Sukarni dan Chaerul Saleh. Rapat memutuskan untuk menyingkirkan Soekarno-Hatta dari Jakarta untuk dibawa ke Rengasdengklok. Para pemuda datang pada dini hari tanggal 16 Agustus dengan menyatakan bahwa pemuda akan segera melaksanakan perebutan kekuasaan, karena itu agar mereka tidak terancam jiwanya, perlu diamankan. Masalahnya, mengapa Rengasdengklok dipilih sebagai tempat persembunyian pemimpin kita? Karena di sana terdapat kesatuan Peta bersenjata yang cukup besar dan penguasa setempat maupun rakyat di situ pada umumnya anti Jepang dan pro perebutan kekuasaan. Selama sehari kedua pemimpin itu disembunyikan. Sampai sore hari perebutan kekuasaan seperti yang dikatakan pemuda-pemuda tidak terjadi. Sementara itu Laksamana Maeda sedang bingung mencari Soekarno-Hatta untuk menyampaikan kabar resmi penyerahan Jepang seperti yang telah dijanjikannya. Dengan bantuan Wikana, Maeda mengetahui kalau Soekarno-Hatta disingkirkan ke Rengasdengklok. Lalu Maeda minta Subardjo untuk menyampaikan kabar resmi tersebut dan mengambil mereka kembali ke Jakarta. Subardjo tiba di Rengasdengklok sudah petang hari.

Setelah kabar resmi tentang penyerahan Jepang diterima, Soekarno-Hatta dan para pemuda di antaranya Sukarni kempa-

li ke Jakarta. Soekarno-Hatta tiba di kota itu sudah pukul 23.00 malam. Segera Hatta mempersiapkan rapat dan menghubungi para anggota yang tentunya telah dibuat bingung karena kepergian mereka. Rapat akan diselenggarakan di Hotel Des Indes. Akan tetapi peraturan melarang adanya rapat-rapat sesudah pukul 22.00. Karena itu tawaran Maeda yang baik hati itu diterima, rapat diselenggarakan di rumahnya di Miyokodori (*Nassau-Boulevard*), kini jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Sebagai anggota PPKI, Jap Tjwan Bing hadir dalam rapat tersebut bersama anggota-anggota yang lain. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo merumuskan naskah proklamasi di ruang belakang disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro. Rapat berlangsung sampai pukul 06.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Hasil rumusan tersebut kemudian dibawa ke sidang agar semua yang hadir ikut bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi tersebut sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Akan tetapi hal itu ditentang oleh golongan pemuda. Kemudian Sukarni mengusulkan agar naskah Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Ternyata usul tersebut disetujui dan saat itu juga naskah Proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan disaksikan oleh semua yang hadir.<sup>7</sup> Adapun bunyinya

#### Proklamasi \*)

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun '45  
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno / Hatta

\*) EYD

Setelah teks Proklamasi itu disetujui, maka pada pukul 10.00 pagi Soekarno membacakan teks tersebut bertempat di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Setelah itu dikibarkan pula Sang Saka Merah Putih dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka dibentuklah lembaga pemerintahan sebagai layaknya suatu negara merdeka. Untuk keperluan tersebut perlulah pembentukan Undang-Undang Dasar diselesaikan sehingga lembaga pemerintahan baru itu mempunyai peraturan-peraturan dasar sebagai pedoman kerjanya. Untunglah BPUPKI telah mempersiapkan pekerjaan itu, sehingga PPKI, yang atas inisiatif Bung Karno anggotanya telah ditambah dengan enam orang lagi sehingga lebih mencerminkan perwakilan rakyat Indonesia dan menunjukkan kepada dunia bahwa lembaga tersebut bukanlah buatan Jepang semata-mata. Pada tanggal 18 Agustus 1945 siang telah berhasil dibentuk Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.<sup>8</sup>

Rapat pengesahan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 ini diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggota-anggota yang hadir waktu itu adalah sebagai berikut ?

1. Drs. Jap Tjwan Bing
2. Prof. Mr. Dr. R. Supomo
3. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
4. R.P. Suroso
5. M. Soetardjo Kartohadikusumo
6. K.H.A. Wahid Hasjim
7. Ki Bagus H. Hadikusumo
8. R. Otto Iskandardinata
9. Abdul Kadir
10. Surjohamidjojo
11. B.P.H. Purobojo
12. Mr. J. Latuharhary

13. Dr. M. Amir
14. Abdul Abbas
15. Mr. Moh. Hassan
16. Hamdhani
17. Dr. Ratulangi
18. Andi Pangeran
19. I Gusti Ktut Pudja
20. R.A.A. Wiranatakusuma
21. Ki Hadjar Dewantara
22. Mr. Kasman Singodimedjo
23. Sajuti Melik
24. Mr. Iwa Kusuma Sumantri
25. Mr. A. Subardjo

Dalam rapat itu Jap Tjwan Bing bersama-sama dengan Sutardjo Kartohadikusumo, Ki Hadjar Dewantara, Hadikusumo, Wiranatakusuma Surjohamidjojo, dan sebagai ketuanya Moh. Hatta, membahas tentang perekonomian dan keuangan.<sup>1 0</sup>

Selanjutnya pada hari itu juga diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar yang baru selesai dibentuk. Atas usul secara aklamasi PPKI menyetujui pengangkatan Soekarno—Hatta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

Pada hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan usahanya yaitu memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, yaitu: Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI ditetapkan pokok-pokok mengenai Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan.

Setelah menetapkan pokok-pokok mengenai Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat itu, maka PPKI menganggap telah menyelesaikan tugasnya dan membubarkan diri. Dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

oleh PPKI itu Komite Nasional Pusat merupakan pembantu Presiden dan Komite Nasional Daerah membantu pemerintah Daerah.

Dengan bubarnya PPKI dan terbentuknya Komite Nasional Pusat itu, maka bekas anggota-anggota PPKI, terutama mereka yang berasal dari daerah-daerah, pulang ke daerah-daerah masing-masing untuk melaksanakan tugas membetuk Komite Nasional Daerah, dengan mendapat mandat sebagai wakil-wakil dari Komite Nasional Pusat.

Dalam Komite Nasional Pusat ini Jap Tjwan Bjing diangkat sebagai anggota yang mewakili kelompok minoritas Tionghoa. Ia bersama-sama dengan enam anggota lainnya yaitu Injo Beng Hoat, Dr. Ong End Die, Siauw Giok Tjhan, Ir. Tan Boen Aan, Liem Koen Hian ikut aktif dalam sidang-sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat terutama dalam menyampaikan ide-ide tentang pembauran.<sup>1 1</sup>

Komite Nasional Pusat ini dilantik oleh Presiden di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta, tanggal 29 Agustus 1945. Dalam pidato pelantikan di antaranya dikatakan bahwa saat itu merupakan pertama kali bangsa Indonesia bisa mewujudkan persatuan sebulat-bulatnya. Bangsa Indonesia selanjutnya dengan jalan diplomasi dan menyusun kekuatan akan berjuang untuk mendapat pengakuan internasional.

Dalam sidangnya yang pertama Komite Nasional Pusat telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Mr. Kasman Singodi-medjo (Ketua), M. Sutardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. J. Latuharhary (Wakil Ketua II), Adam Malik (Wakil Ketua III). Adapun keputusan-keputusan lainnya yang diambil dalam sidang tersebut ialah; Janji anggota Komite Nasional Pusat, Mosi Rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta menyempurnakan kemerdekaan Indonesia dan maklumat tentang kewajiban rakyat Indonesia untuk menyokong Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Selama lebih dari satu bulan Komite Nasional Pusat melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai tindakan di bidang eksekutif selaku pembantu presiden, yang berdasarkan pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memegang seluruh kekuasaan negara untuk sementara waktu.

Keadaan demikian tidak memuaskan sementara golongan yang kemudian dalam sidang kedua yaitu pada tanggal 16–17 Oktober 1945, mengusulkan agar diadakan perubahan mengenai pembagian kekuasaan dalam negara. Sehubungan dengan usul tersebut, maka lahirlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan, sesuai dengan usul dari Komite Nasional Pusat sebagai berikut : "Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat".<sup>1 2</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat membentuk sebuah Badan Pekerja, yang kemudian dikenal dengan nama Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BP.KNIP. Dalam pembentukan itu hadir 15 orang dan diangkat Sutan Sjahrir dan Mr. Amir Sjarifuddin masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua, serta Mr. Suwandi sebagai penulis. Badan Pekerja itulah yang selanjutnya sehari-hari melaksanakan tugas Komite Nasional Pusat.

Sejak terbentuknya BP KNIP hanya bersidang enam kali yaitu; sidang ketiga diadakan pada tanggal 25–27 Nopember 1945 di Jakarta; sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari – 3 Maret 1946 di Solo; sidang kelima dilaksanakan di Malang pada tanggal 25 Pebruari sampai 6 Maret 1946 dan sidang keenam dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 6 – 15

Desember 1949. Jap Tjwan Bing bersama-sama dengan kelompok minoritas Arab yang diwakili oleh Hamid Algadrie dari Jakarta dan Oemar bin Salim Hubeid dari Surabaya ikut aktif dalam sidang tersebut terutama dalam sidang yang kelima dan keenam.<sup>1 3</sup>

Dalam sidang-sidangnya BP KNIP banyak mengalami perubahan-perubahan baik mengenai susunan Komite Nasional Pusat maupun usulan mengenai penambahan anggota yang terdiri dari wakil-wakil daerah. Dalam sidangnya yang keempat, ditetapkan pembaharuan susunan Komite Nasional Pusat yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan berlaku mulai tanggal 8 Juli 1946. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1946, Komite Nasional Pusat terdiri dari 200 anggota, 110 di antaranya ditetapkan menurut pemilihan Daerah-Daerah, 60 merupakan wakil partai-partai politik dan 30 anggota ditunjuk oleh Presiden.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut oleh presiden telah diangkat Pusat Badan Pembaharuan susunan KNP di bawah pimpinan Supeno, yaitu Penetapan Pemerintah tanggal 16-9-1945 No. 19/S.D./1946. Akan tetapi sebelum Undang-Undang terlaksana, pada tanggal 29 Desember 1946 oleh Presiden ditetapkan Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang penyempurnaan Komite Nasional Pusat dengan pertimbangan, bahwa perlu diadakan penyempurnaan KNP yang sesuai dengan aliran-aliran Politik serta golongan-golongan besar dalam masyarakat dan penyesuaian susunannya dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada KNP.

Peraturan Presiden itu memberi hak kepada partai-partai politik besar dan golongan-golongan besar yang belum cukup diwakili dalam KNP untuk mengajukan calon-calon, sedangkan Gubernur diberi wewenang untuk menetapkan wakil-wakil Daerah, bersama-sama dengan badan-badan perjuangan politik di daerahnya. Dengan peraturan itu KNP ditambah anggota-anggotanya menjadi 256 orang, sehingga seluruh jumlah anggo-

ta menjadi lebih dari 407 orang, sewaktu KNP mengadakan sidanganya yang kelima di Malang antara tanggal 25 Pebruari dan 6 Maret 1947.

Anggota-anggota tambahan semuanya diangkat oleh Presiden dengan Maklumat Presiden, yang diumumkan dalam penerbitan resmi Pemerintah yang berjudul "Berita Republik Indonesia".

Dalam susunan KNP yang belum nampak perbandingan perwakilan partai-partai politik yang telah berdiri sejak akhir tahun 1945 maupun perwakilan golongan-golongan lainnya. Oleh karena itu dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 6/1946 nampak dengan jelas perwakilan partai-partai politik dan golongan-golongan dalam KNP sebagai berikut:<sup>1 4</sup>

1. Golongan Warganegara Keturunan Asing masing-masing dengan perincian nama sebagai berikut: etnis Tionghoa berjumlah tujuh orang yaitu, Liem Koen Hian, Drs. Jap Tjwan Bing, Siauw Giok Tjhan, Ir. Tan Boen Aan, Inje Beng Hoat, Dr. Ong Eng Die, Mr. Tan Ling Djie. Untuk etnis Arab berjumlah tiga orang yaitu, A. Bajasud, Hamid Algadrie, Oemar bin Salim Hubeid, sedang untuk etnis Eropa diwakili oleh D. Hage dan Dahler.
2. Partai-partai terdiri atas, Masyumi 60 orang, PNI 45 orang, Partai Sosialis 35 orang, partai Buruh Indonesia 35 orang, PKI 35 orang, Parkindo 8 orang, Partai Katolik Republik Indonesia 4 orang.
3. Golongan-Golongan : Buruh 40 orang, Tani 40 orang.
4. Daerah-Daerah: Sumatera 51 orang, Kalimantan 12 orang, Sulawesi 15 orang, Maluku 7 orang dan Sunda Kecil 7 orang. Di samping itu ada pula anggota-anggota yang tidak berpartai.

Dalam tahun 1948 terjadi perubahan-perubahan dalam dunia kepartaian, di antaranya pemisahan diri Partai Sosialis Indonesia di bawah pimpinan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis

Indonesia pimpinan Amir Sjarifuddin pada tanggal 13 Pebruari 1948 dan terbentuknya Partai Murba pada tanggal 7 Nopember 1948. Namun demikian pengaruhnya atas susunan perwakilan KNP belum nampak karena selama tahun 1948 tidak ada sidang KNP.

Perubahan mengenai susunan keanggotaan KNP baru terjadi dalam tahun 1949, setelah ditetapkan Undang-Undang No. 6/1949 tentang penambahan jumlah anggota KNP yang mulai berlaku tanggal 28 Nopember 1949. Undang-Undang itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa beberapa partai politik belum mempunyai perwakilan dalam KNP dan dalam Badan Pekerja KNP. Selain itu, sebelum terbentuknya DPR, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan perlu diberi kesempatan kepada partai-partai itu menempatkan wakil-wakilnya dalam KNP dan Badan Pekerja KNP, agar semua aliran-aliran dalam masyarakat dapat mendengarkan suaranya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Presiden mengangkat anggota-anggota KNP baru sebagai wakil-wakil dari Partai Syarikat Islam Indonesia 12 orang, Partai Katholik Republik Indonesia 10 orang dan Partai Murba 6 orang. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan penetapan Presiden, bukan dengan maklumat Presiden seperti dalam tahun 1947.

Dengan adanya pengangkatan itu dan berbagai mutasi lainnya maka sewaktu diadakan sidang yang keenam, anggota KNP seluruhnya berjumlah 536 orang. Sidang yang keenam yang berlangsung di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta dari tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 1949 merupakan sidang yang terakhir. Dalam sidang yang keenam ini Jap Tjwan Bing ikut menyumbangkan ide-idenya tentang keputusan-keputusan lain di samping menyetujui hasil-hasil Konperensi Meja Bundar. Keputusan-keputusan lain itu di antaranya yaitu menentukan tiga calon anggota senat RIS. Menentukan cara penunjukkan 50 anggota DPR RIS utusan-utusan dari Republik Indonesia Yogya.<sup>15</sup>

#### 4.1 *Aktivitas Jap Tjwan Bing dalam Konperensi Indonesia – Tionghoa*

Dalam tahun 1946, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan konsolidasi di dalam segala lapangan, maka perhatian pemerintah dengan segera ditujukan kepada soal bangsa asing yang hidup di tanah air kita. Bukankah Rakyat Indonesia berani memproklamasikan kemerdekaan, berarti juga bahwa Pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya dapat memperlakukan segala bangsa asing yang ada di tanah air kita, menurut dasar-dasar yang termaktub di dalam Undang-Undang kita.

Dalam tahun pertama segala pikiran dan tenaga dari rakyat dan Pemerintah ditujukan kepada usaha merebut kekuasaan dari Jepang, menanam dasar-dasar Negara Republik Indonesia dan membentuk pertahanan tanah air terhadap agresi dari luar. Dapat dikatakan, bahwa Pemerintah dapat menjamin keselamatan bangsa asing.

Di sana-sini memang ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, akan tetapi segala kesusahan ini tidak hanya mengenai bangsa asing, banyak dari kalangan bangsa Indonesia yang menjadi korban akibat revolusi.

Meskipun banyak rintangan-rintangan terutama dari luar, pemerintah berusaha terus untuk menjalankan kewajibannya sebagai negara yang merdeka terhadap bangsa asing. Di dalam kalangan bangsa asing, penduduk Tionghoa mempunyai tempat yang luas dan penting sekali. Luas dalam arti banyak jumlahnya, dan penting berhubung dengan kedudukan mereka sebagai pedagang dan pemilik perusahaan, baik kecil maupun besar.

Sehubungan dengan itu maka Pemerintah mengadakan konperensi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Tionghoa. Di dalam konperensi tersebut soal-soal yang dibicarakan ialah, perekonomian, pengungsian, pengajaran dan keamanan. Adapun penyelenggara konperensi tersebut adalah Tji Sam Kong, Jap Tjwan Bing, Ir. Tan Boen Aan, Mr. Tan Po Goan

yang merupakan wakil-wakil dari golongan Tionghoa, sedangkan wakil-wakil dari pemerintah adalah Arudji Kartawinata (Menteri Muda Pertahanan), Mr. Tirtawinata (Jaksa Agung Tentara), Imam (Kementrian Negara), Mr. Kasman Singodimedjo (Ketua Kehakiman Tentara), R.S. Sukanto Tjokrodiatmodjo (Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia) dan Haryoto (Kementerian Penerangan). Konperensi tersebut berlangsung mulai tanggal 16–17 September 1946 bertempat di pendopo kepatihan Yogyakarta. Resepsi sebagai pendahuluan konperensi dihadiri oleh Wakil Presiden, para Menteri, Panglima Besar Sudirman, Ketua DPA Wiranatakusumah, para Gubernur, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan wakil-wakil badan.<sup>16</sup>

Setelah dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia, rapat dibuka oleh Ketua Panitia saudara Tji Sam Kong. Pimpinan rapat selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Penerangan sebagai wakil Pemerintah.

Saudara Tabrani yang memimpin sidang itu seterusnya menyatakan bahwa pada tahun pertama setelah dimulainya revolusi nasional pada tanggal 17 Agustus 1945 Pemerintah belum mendapat kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang mengenai pembangunan dan kedudukan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Baru dalam tahun kedua, setelah keadaan masyarakat agak teratur, kedudukan bangsa asing mulai diperhatikan. Golongan Tionghoa sejak dahulu mempunyai kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kedudukan golongan-golongan lainnya, oleh karena itu mereka turut juga menentukan jalannya perekonomian dan lain-lainnya. Selanjutnya perlu terlebih dahulu ditentukan garis-garisnya yang menuju ke arah kerjasama sesuai dengan cita-cita segenap bangsa Indonesia, seperti telah termaktub dalam undang-undang.

Dalam konperensi itu Wakil Presiden Moh. Hatta dalam amanatnya juga menyatakan, bahwa kedudukan bangsa Tionghoa di Indonesia memang menimbulkan berbagai kesukaran, yang harus dihadapi oleh Pemerintah dan oleh golongan Tionghoa sen-

diri. Kesukaran-kesukaran itu timbul dalam sejarah yang lampau, bersangkutan paut dengan politik jajahan Belanda dahulu. Pemerintah Republik Indonesia yang menerima warisan tidak baik itu, hendak menyelesaikan segalanya menurut cita-cita yang menjadi dasar pemerintahan negara kita.

Dalam usahanya untuk menyelesaikan soal-soal tersebut di atas itu sering-sering ditemui kesukaran dalam usahanya untuk menyelesaikan soal-soal tersebut diatas itu sering-sering ditemui kesukaran yang ditimbulkan oleh sebagian golongan Tionghoa, hingga bangsa Tionghoa disini banyak mengalami keadaan yang tidak enak, sebagai akibat daripada masa yang lampau bangsa Tionghoa di sini banyak mengalami keadaan yang tidak enak, sebagai akibat daripada masa yang lampau.

Kini stelsel ekonomi senantiasa harus di dasarkan kepada kesejahteraan sosial. Perekonomian tidak lagi dikemukakan oleh pengusaha-pengusaha partikelir dengan semau-maunya, melainkan pemerintah akan mengadakan susunan yang teratur dan mendapat kekuasaan yang tertentu dalam pimpinan produksi dan distribusi. Apabila golongan Tionghoa di sini dapat menyesuaikan dirinya dengan semangat ekonomi baru, yang menjadi dasar perekonomian Republik Indonesia, niscaya kedudukannya terhadap ekonomi bangsa Indonesia akan berlainan daripada dahulu. Tenaga ekonominya akan dikordinasi dengan tenaga ekonomi Indonesia. Dari lawan ia akan menjadi kawan dan dengan sendirinya hilanglah 'soal Tionghoa'.<sup>17</sup>

Dalam pembicaraan selama konperensi itu amanat tersebut cukup banyak mendapat tanggapan, baik dari pihak Pemerintah maupun dari golongan Tionghoa. Jap Tjwan Bing dalam diskusi hari pertama mengatakan bahwa pergolakan bangsa Indonesia menentang penjajahan dapat disetujui oleh bangsa Tionghoa dari seluruh Jawa dan Madura. Oleh karena itu perlu adanya persatuan dan kesatuan. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa bangsa Tionghoa sebagai bangsa Asia yang mempunyai San Min Chu I, harus membantu gerakan bangsa Indonesia. Kerenggangan perhubungan antara etnis itu antara lain adalah lantaran ke-

kurangan penerangan yang sering menimbulkan salah paham, oleh karena itu perlu kita memperhebat penerangan agar bangsa Tionghoa dapat mengerti isi jiwa revolusi Indonesia dan rakyat Indonesia juga mengerti bahwa orang Tionghoa yang ada di Indonesia bukan musuh bangsa Indonesia, bahkan sanggup membantu gerakan kebangsaan bangsa Indonesia di garis belakang, dengan jalan siaran radio dalam bahasa Indonesia dan Tionghoa. Pernyataan ini kemudian juga di garisbawahi oleh Mr. Ko Siok Hie, Mr. Tan Po Goan, Ir. Tan Boen Aan.<sup>1 8</sup>

Setelah terjadi diskusi yang cukup menarik, maka pada hari terakhir konperensi tersebut diputuskan bahwa dengan berdasarkan ketaatan dari penduduk Tionghoa terhadap pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan buah-buah pembicaraan sebagai berikut.<sup>1 9</sup>

- 1) Berdasarkan atas peraturan yang telah ada, pengungsian akan diusahakan sebaik-baiknya dengan mengingat siasat perjuangan dengan meminta bantuan dari organisasi-organisasi yang berkepentingan, misalnya Chung Hwa Chung Hwee (CHTH).
- 2) Ketaatan penduduk Tionghoa kepada Pemerintah dan penjelasan-penjelasan dari pihak Tionghoa sangat diperhatikan oleh pemerintah.
- 3). Pemerintah mengakui adanya perkumpulan CHTH sebagai organisasi yang memperhatikan kepentingan penduduk Tionghoa.
- 4) Pemerintah menganjurkan supaya golongan Tionghoa dengan perantaraan organisasinya selalu berhubungan dengan Pemerintah.
- 5) Pada umumnya pemerintah tak berkeberatan bangsa Tionghoa memberi pendidikan dan pengajaran di perguruan-perguruan Tionghoa, asal tidak mengganggu ketenteraman umum dan membahayakan tetap berdirinya Republik Indonesia.

- 6) Pemerintah sedapat mungkin membantu meringankan kesukaran-kesukaran tentang perumahan dan alat-alat pelajaran untuk sekolah-sekolah Tionghoa.
- 7) Mengusahakan tindakan-tindakan yang tepat agar bangsa Tionghoa merasa aman dan tenteram tinggal di daerah Pemerintah Republik Indonesia.

#### 4.2 *Aktivitas Jap Tjwan Bing dalam Konperensi Indonesia dengan Belanda "Peranakan"*

Di tengah-tengah kesibukan sidang BP KNP di Purworejo pada tanggal 6 Januari 1947 yang membahas Peraturan Presiden No. 6 tentang penambahan anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang penuh pro dan kontra, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno BP KNP tanggal 12 Pebruari 1947 di Malang yang sebagian acaranya membahas mengenai perundingan-perundingan Indonesia dengan pihak Belanda, maka di Yogyakarta juga berlangsung konperensi antara Pemerintah dan Peranakan Belanda, pada tanggal 1 – 2 Pebruari 1947. Tiap karesidenan mengirimkan dua orang Wakil Belanda "Peranakan" satu orang wakil Pamong Praja dan satu orang wakil Jawatan Penerangan Daerah.

Adapun maksud konperensi tersebut adalah memberi kesempatan kepada Belanda Peranakan untuk memajukan atau mencurahkan isi hatinya terhadap usaha pembangunan dan perjuangan. Konperensi tersebut tidak diadakan dengan satu perkumpulan Peranakan melainkan dengan golongan Belanda "Peranakan" seluruhnya. Panitia konperensi Indonesia Belanda "peranakan" itu terdiri atas:<sup>20</sup>

Ketua	: De Roock
Wakil Ketua I	: Fachruddin
Wakil Ketua II	: Jusupadi
Sekretaris I	: Harjoto
Sekretaris II	: Dwidjosoegondo
Bendahara I	: Drs. Jap Tjwan Bing
Bendahara II	: K.R.T. Honggowongso

Dengan melihat aktivitas Jap Tjwan Bing tersebut, nampak ia menganjurkan pembauran. Dari konperensi Indonesia – Ti-onghoa yang kemudian dilanjutkan dengan konperensi Indonesia dengan Belanda "peranakan" ini, ide-ide pembauran semakin tertanam pada dirinya.

Dalam malam resepsi Konperensi Belanda "peranakan" dengan Pemerintah yang berlangsung di Kepatihan Yogyakarta, De Roock selaku ketua panita konperensi menerangkan, mengatakan betapa pentingnya konperensi tersebut bagi pembangunan dan persatuan Indonesia. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa tidak datangnya IEV yang telah diundang untuk menghadiri konperensi ini, sangat disesalkan dan membuktikan, bahwa teriak mereka untuk memperhatikan nasib golongan Indo di daerah pendalaman adalah suatu kebohongan.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam sambutannya mengemukakan, bahwa Indonesia tetap menghormati bangsa-bangsa lain, malah bersedia pula memberi tempat yang selayaknya terhadap bangsa-bangsa lain itu, asal saja mereka itu bersikap hormat dan bersopan santun sebagai tamu. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa Pemerintah selalu bersedia memperhatikan nasib golongan lain. Mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat kita.

Di samping itu, Presiden Republik Indonesia Soekarno dalam sambutannya mengatakan "Bersatulah dengan Bangsa Lain". Dunia luar salah mengerti, yang menyatakan bahwa kita adalah anti kulit putih, anti Nederlander, terlebih dahulu harus dilenyapkan. Kebanyakan dari masyarakat Belanda, jika mendengarkan suara Bung Karno, mengatakan: "*Daar heb je Soekarno weer, de grootste Nederlander-hater*". Lebih lanjut Bung Karno mengatakan, "kita tidak membenci bangsa lain," dan tidak menentang golongan atau bangsa lain, akan tetapi yang kita tentang ialah sistem penjajahan yang tidak mau mengetahui akan keadilan. Pergerakan bangsa Indonesia bukannya

anti kulit putih seperti yang digembar-gemborkan oleh pihak penjajah, akan tetapi melulu pergerakan melawan penjajah".<sup>2 1</sup>

Pergerakan bangsa Indonesia bukannya ditimbulkan oleh satu dua orang pemimpin saja, akan tetapi memang timbul dari sifat hakekat keadaan. Makin menyalanya pergerakan karena dibakar oleh pihak imperialis sendiri.

Bung Karno juga membentangkan riwayat pergerakan kebangsaan sejak lahirnya pada tahun 1908, mulai dari yang bersifat kooperatif, akan tetapi oleh karena tindakan-tindakan pihak penjajah akhirnya bersifat non kooperatif, hingga pada suatu waktu pergerakan tersebut sedemikian memuncaknya, sampai mewujudkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sesudah itu Pemerintah Republik Indonesia mengalami berbagai kesukaran dari golongan-golongan bangsa yang ada di Indonesia, terutama terhadap golongan-golongan Indonesia yang tidak tentu kedudukannya. Oleh karena itu dalam konperensi ini pemerintah telah membuka jalan seluas-luasnya bagi golongan indo yang ingin menyesuaikan diri dengan bangsa Indonesia.

Konperensi tersebut selain dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden di hadiri juga oleh para menteri, Dr. Douwes Dekker, dan wakil-wakil berbagai golongan dan partai-partai, 50 utusan dari daerah-daerah seluruh Jawa, kecuali Wakil dari Bogor dan Madura, mengunjungi konperensi tersebut.

Adapun dalam konperensi tersebut pemerintah memutuskan antara lain : Pemerintah dalam azasnya menyetujui permintaan penetapan tenaga-tenaga warganegara Peranakan Belanda dalam pelbagai lapangan pekerjaan. Di pelbagai Jawatan telah diterima dan diadakan saringan untuk menempatkan mereka menurut kecakapannya. Penempatan tenaga warganegara Peranakan Belanda dalam Angkatan Perang secara individual telah dilakukan. Di samping itu, Pemerintah juga menyetujui dibentuknya satu panitia yang akan menyelidiki hak milik

warga negara Peranakan Belanda yang ada di tangan yang tidak berhak, dengan memberi laporan se jelas-jelasnya supaya Pemerintah dapat mengambil tindakan se adil-adilnya. Selanjutnya dalam bidang keamanan, pihak warga Peranakan Belanda supaya menunjukkan peristiwa-peristiwa tentang kejadian yang mengenai soal keamanan. Di bidang pengajaran, Pemerintah yaitu memperluas kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Demikianlah hasil putusan Pemerintah dalam Konperensi Indonesia dengan Belanda Peranakan yang berlangsung dua hari di Yogyakarta.

#### 4.3 *Aktivitas Jap Tjwan Bing Menentang Pembentukan Negara Pasundan.*

Menjelang pembukaan konperensi Jawa Barat di Bandung, Yogyakarta menyiarkan berbagai pidato. Pada tanggal 19 Februari 1948, R.A.A. Wiranatakusumah menyampaikan pidatonya dihadapan 10.000 orang yang intinya menentang pembentukan Negara Jawa Barat. Karena pidato tersebut maka pemuda-pemuda Jawa Barat tergerak hatinya ingin terus berjuang di bawah komando pusat perjuangan kemerdekaan, yaitu Republik Indonesia. Pemuda-pemuda Jawa Barat tidak mau dipisahkan dari seluruh daerah Republik, baik itu dari kelompok pribumi maupun dari kelompok minoritas Tionghoa, Arab, dan lain-lainnya. Jap Tjwan Bing yang pada tahun tersebut masih bertempat tinggal di Jalan Cipaganti 23 Bandung ikut aktif sebagai pengurus pemuda di daerah Priangan. Ia bersama-sama Sanusi Hardjadinata dan Kosasih ikut aktif menggerakkan pemuda menentang pembentukan negara Pasundan. Begitulah kata Sanusi Hardjadinata.<sup>2 2</sup>

Walaupun akhirnya pada tanggal 4 Maret 1948, Parlemen memilih R.A.A. Wiranatakusumah menjadi Wakil Negara Pasundan, namun dalam pidatonya yang disampaikan kepada kantor berita antara ia mengatakan, "Sungguhpun dalam prinsip saya tidak setuju dengan perceraian Jawa Barat dengan Repub-

lik, oleh karena semenjak permulaan saya bersifat Republik, saya bersedia menerima pengangkatan itu. Saya percaya bahwa Pemerintah Republik tidak akan memajukan keberatan-keberatan, oleh karena jika saya berada di sana, lebih besarlah ketika saya untuk bekerja bagi Nusa dan Bangsa daripada apa yang saya dapat mempertunjuk di hari-hari yang lampau".<sup>2 3</sup>

Dengan terpilihnya R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Wali Negara Pasundan, maka Belanda mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap pemuda dan pegawai-pegawai Republik Indonesia yang tak bersedia membantu Belanda. Nasib pegawai-pegawai menjadi tidak keruan. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Belanda terus diburu dan ditawan. Pembesar-pembesar seperti Gubernur dan Residen-residen Republik Indonesia pun mengalami perlakuan yang demikian. Penangkapan-penangkapan dilakukan dengan licik sekali.

Pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 1948 Residen Priangan dan Bupati Tasikmalaya ditangkap di Bandung tanpa diketahui dengan jelas sebab musababnya, dan pada hari itu juga di Jakarta dilakukan pula penangkapan atas diri Ir. Ukar dan R. Enokh ketika mereka baru saja turun dari kereta api di stasiun Manggarai. Selain itu, Belanda juga mengadakan penangkapan terhadap beberapa Wedana dan Camat antara lain, Wedana Ciawi, I. Gandana, Wedana Conggeang, Sukri Atmajasapura, Camat Cadasgempur, Daud Wiradilaga, Camat Rancakalong, Gunawan serta beberapa lurah yang secara mendadak disergap oleh pihak Belanda.

Janjikan mereka yang pernah duduk dalam Badan-Badan Perjuangan atau Kelasykaran, bahkan pegawai pemerintah sipil pun yang sebenarnya tidak ada sangkut-pautnya dengan soal ketentaraan, tidak terjamin dalam soal keamanan.

Selanjutnya delegasi RI membicarakan kedudukan Pegawai Negeri dengan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Pihak Republik menawarkan tenaga pegawai-pegawai untuk badan-badan pemerintah Belanda di daerah-daerah pendudukan, de-

ngan syarat supaya mereka diperkerjakan dalam susunan organisasi dan tidak secara sendiri-sendiri. Akan tetapi cara demikian itu justru tidak dikehendaki oleh pihak Belanda. Kemudian Belanda mengadakan penangkapan terhadap Wakil Residen Sanusi Hardjadinata, dan H. Junaedi, Direktur *Pemandangan*, karena tidak bersedia bekerjasama dengan Belanda. Begitu pula Dr. Toha ditangkap di Cirebon atas tuduhan membantu kaum gerilya.

Keganasan-keganasan tersebut terus berlangsung, sedangkan pemerintah RI mengizinkan Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Wiranatakusumah, menjadi Wali Negara Pasundan, yang kemudian diikuti oleh tenaga-tenaga baru seperti ex Residen Sirad, Kosasih, Jap Tjwan Bing, Kartajumena dan lain-lain.<sup>24</sup> Tenaga-tenaga yang selama itu setia kepada Republik dan ikut bergerilya, akhirnya berangsur-angsur mengikuti jejak Wali Negara. Gejala ini menunjukkan adanya krisis perjuangan RI.

Sementara itu, di daerah pendudukan tetap menyala gerakan Republikein, seperti gerakan Islam di Bandung. Pada tanggal 1 April 1948, Persatuan Islam dengan dipelopori oleh Kyai Isa Asyari berdiri kembali. Sejak itulah terjadi perkembangan baru dengan diadakannya konperensi partai-partai Islam pada tanggal 13 April 1948, yang diketuai oleh Jaya Rakhmat. Konperensi itu dihadiri oleh wakil-wakil Muhammadiyah, Nahdltul Ulama, Persatuan Islam, dan Persatuan Guru Islam Indonesia.

Gerakan ini mengasingkan diri dari negara Pasundan. Secara berangsur-angsur bangkitlah kembali semangat rakyat untuk melawan Belanda, terutama anak-anak Hizbullah-Sabilillah di daerah-daerah pegunungan Priangan-Cirebon-Bogor. Mereka terus beraksi mengadakan perlawanan-perlawanan di daerah Priangan Timur dan juga di kota kecamatan Ciawi dekat Tasikmalaya. Pos Polisi Belanda dihancurkan, di samping itu camat Belanda juga menjadi korban.

Sementara itu proses pembentukan negara Pasundan berlangsung terus. Kusumaatmadja dipilih menjadi Perdana Mente-

ri tetapi ia menolak untuk menjadi formateur kabinet negara Pasundan, karena ia menganggap bahwa pembentukan negara tersebut adalah pelanggaran atas persetujuan Renville dan tidak berdasarkan kemauan dan suara rakyat yang bebas dan merdeka. Karena adanya penolakan dari Kusumaatmadja itu, maka akhirnya dipilih Adil Puradiredja sebagai Perdana Menteri, merangkap Menteri Dalam Negeri Negara Pasundan.

Adapun susunan kabinet Negara Pasundan itu adalah sebagai berikut: (1) Perdana Menteri, Adil Puradiredja, merangkap Menteri Dalam Negeri. Menteri Kemakmuran dipegang oleh Dendakusumah, Menteri Pengajaran Yudakusumah, Menteri Lalu Lintas & Pengairan adalah Tan Hwat Tiong, Menteri Keuangan oleh P.J. Gerke, dan Menteri Sosial dipegang Bunyamin. Nama-nama yang memimpin Kementerian Kehakiman dan Kesehatan diumumkan kemudian.

#### 4.4 *Aktivitas Jap Tjwan Bing dalam Persatuan Tionghoa Indonesia*

Karena adanya konperensi Indonesia dengan golongan Tionghoa yang berlangsung di Yogyakarta pada bulan September 1946, maka timbul pada diri Jap Tjwan Bing untuk mendirikan suatu perkumpulan politik peranakan Cina. Jap minta nasihat kawan-kawannya yang tergabung dalam anggota BP KNP yaitu Dr. Ong Eng Die, Ir. Tan Boen Aan dan lain-lainnya. Ide ini disambut dengan baik oleh kawan-kawannya. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1948 mereka mengadakan pertemuan di Jakarta. Banyak tokoh-tokoh politik peranakan Cina yang hadir. Di samping itu dalam pertemuan tersebut juga diundang tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi Chung Hwa Tsung Hui (CHPH). Mereka itu adalah Chung Hua Siang HWee, Sin Ming Hui, Chung Hua Tsing Niew Hwee.<sup>2 5</sup>

Dalam pertemuan itu Jap Tjwan Bing ikut aktif menyumbangkan ide-idenya terutama yang menyangkut asas persamaan hak dan kewajiban. Setelah terjadi perdebatan tentang usulan

nama perkumpulan tersebut, maka pada tanggal 23 Mei 1948 malam hari secara aklamasi mereka memilih nama Persatuan Tionghoa Indonesia, dengan Thio Thiam Tjong dan Jap Tjwan Bing dipilih sebagai pananggung jawab organisasi tersebut.

Adapun tujuan Persatuan Tionghoa Indonesia adalah berjuang untuk asas-asas demokrasi, hak-hak perseorangan, dan realisasi persamaan hak dan kewajiban untuk tiap-tiap warganegara dengan tidak memandang keturunan dan kebudayaan. Di samping itu, pembauran adalah sangat penting untuk persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

#### 4.5 *Jap Tjwan Bing Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat.*

Dengan pulihnya kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai salah satu hasil dari Konperensi Meja Bundar antara delegasi-delegasi Kerajaan Belanda, Republik Indonesia dan BFO (wakil-wakil dari Daerah-Daerah/Negara-negara buatan Belanda di luar Republik Indonesia), lahirlah Republik Indonesia Serikat yang selanjutnya terkenal dengan sebutan RIS.

Menurut pasal 1 dan 2 Konstitusi Sementara, RIS adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi, terdiri dari Negara Republik Indonesia Yogya dan Negara-Negara bagian serta daerah-daerah lainnya yang didirikan oleh Belanda ketika melawan Republik Indonesia, antara tahun 1946–1949 yaitu, Negara-negara bagian Indonesia Timur, Jawa Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, daerah-daerah: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur dan Banjar.

Adapun kedaulatan RIS dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang merupakan Parlemen RIS. Dewan Perwakilan Rakyat RIS mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota, yaitu 50 orang dari Daerah bagian Republik Indonesia Yogya dan 100 orang dari Daerah-daerah selebihnya.

Menurut pasal-pasal 109 dan 110 Konstitusi Sementara RIS maka Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama dibentuk menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>2 6</sup>

- 1) Cara mengutus anggota ke DPR RIS diatur oleh Daerah-daerah bagian, dengan ketentuan bahwa jika tidak dapat dilakukan dengan jalan pemilihan umum, pengutusan itu dilakukan dengan penunjukan oleh Perwakilan-perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan atau dengan jalan lain menurut kehendak rakyat Daerah.
- 2) Pengutusan 100 orang dari Daerah-daerah di luar Republik Indonesia Yogya diselenggarakan pula dengan perundingan bersama-sama oleh Daerah-daerah yang bersangkutan. Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus di antara daerah-daerah itu diambil sebagai dasar perbandingan jumlah jiwa rakyat daerah-daerah bagian tersebut.

Adapun golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa, dan Arab menurut pasal 100 harus mempunyai wakil-wakil berturut-turut 9, 6, dan 3 orang. Kalau jumlah itu tidak tercapai dengan pengutusan menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah RIS mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil.

Menurut pasal 80 dan seterusnya Konsitusi RIS, Senat merupakan perwakilan-perwakilan Daerah-daerah bagian, dan setiap Daerah bagian diwakili oleh dua orang anggota. Anggota-anggota tersebut ditunjuk oleh Pemerintah Daerah bagian dari tiga calon yang diajukan oleh Perwakilan-Perwakilan Rakyat Daerah bagian masing-masing. Daerah-daerah bagian mengadakan sendiri peraturan-peraturan yang perlu untuk menunjuk anggota-anggota dalam Senat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka terbentuk DPR dan Senat RIS yang pertama, pada tanggal 15 Pebruari 1950. Rapat gabungan tersebut dipimpin oleh anggota DPR yang tertua usianya, Sonda Daeng Mattajang.

Selanjutnya mengenai keanggotaan DPR dan Senat RIS terdapat berbagai ketentuan dalam Konstitusi Sementara RIS, yaitu berturut-turut dalam bagian III dan II dari Bab III Konstitusi tersebut. Yang boleh menjadi anggota DPR ialah warganegara tersebut. Yang boleh menjadi anggota DPR ialah warganegara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperdipilih telah dicabut. Syarat ini berlaku pula bagi keanggotaan Senat, hanya umur ditetapkan minimum 30 tahun. Anggota DPR maupun anggota Senat sebelum memegang jabatan harus disumpah di hadapan Presiden atau dihadapan Ketua DPR/Senat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, masing-masing menurut rumusan sumpah yang ditetapkan dalam konstitusi.<sup>2 7</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan itu maupun ketentuan-ketentuan tentang pembentukan DPR dan Senat RIS, maka daerah-daerah bagian mengadakan penunjukan wakil-wakil, sehingga tersusun keanggotaan DPR dan Senat RIS pertama sebagai berikut; DPR RIS terdiri atas 146 anggota, yaitu wakil-wakil dari 16 negara/daerah bagian: Republik Indonesia Yogya berjumlah 49 orang, Jap Tjwan Bing termasuk anggota no. 48 menurut daftar anggota DPR RIS. Ia disumpah pada tanggal 20 Pebruari 1950, Indonesia Timur 17 orang, Jawa Timur 15 orang, Madura 5 orang, Pasundan 21 orang, Sumatera Timur 4 orang, Sumatera Selatan 4 orang, Jawa Tengah 12 orang, Bangka 2 orang, Belitung 2 orang, Riau 2 orang, Kalimantan Barat 4 orang, Dayak Besar 2 orang, Banjar 3 orang, Kalimantan Tenggara 2 orang dan Kalimantan Timur 2 orang.

DPR RIS ini hanya berlangsung enam bulan, yaitu dari tanggal 15 Pebruari sampai 15 Agustus 1950. Dalam menjalankan tugasnya itu DPR RIS telah menyelesaikan 7 buah Undang-Undang. Dari 7 buah undang-undang itu sebuah adalah berdasarkan usul inisiatif dari DPR, yaitu Undang-Undang No. 4/1950 tentang penggantian kerugian anggota DPR RIS, sedangkan tiga buah undang-undang merupakan penetapan undang-undang darurat menjadi undang-undang.

Selain itu juga diselesaikan Undang-Undang No. 7/1950 yaitu Undang-Undang perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perubahan dalam negeri. Jap Tjwan Bing juga ikut berperan serta dalam penyelesaian Undang-Undang No. 7 tersebut. Ia juga ikut aktif membicarakan dan menyelesaikan hal-hal yang menyangkut tuntutan untuk membubarkan Daerah bagian dan menggabungkannya dengan Republik Indonesia Yogya.<sup>28</sup> Semula DPR akan menyelesaikan sebagai undang-undang pertama rancangan undang-undang tentang perubahan susunan kenegaraan wilayah RIS yang telah diajukan oleh pemerintah pada tanggal 20 Pebruari 1950. Akan tetapi kemudian pemerintah menarik kembali rancangan itu dan materinya ditetapkan dalam bentuk undang-undang darurat. Akhirnya sampai DPR RIS bubar, undang-undang darurat tersebut belum sampai ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR. Rancangan undang-undang yang dibicarakan dan diselesaikan pertama oleh DPR RIS adalah rancangan undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

#### **4.6 *Aktivitas Jap Tjwan Bing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Tahun 1950.***

Pada tanggal 14 Agustus 1950 telah disetujui oleh DPR dan Senat RIS tentang Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No. 7/1950. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan Rapat Gabungan DPR dan Senat RIS. Dalam rapat itu dilakukan suatu upacara pembacaan Piagam Pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno yang sekaligus mempunyai dua maksud ialah pertama, pembubaran dengan resmi Negara RIS yang berbentuk Federasi. Kedua, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh Daerah Indonesia dengan Undang-Undang

Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.<sup>29</sup>

Dengan lahirnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, maka Republik Indonesia yang berbentuk federal berubah menjadi unitaris. Lahirnya Negara Kesatuan itu adalah perubahan dalam negeri semata-mata, yang diperbolehkan oleh pasal 190 Konstusi RIS.

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia itu ditetapkan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat yang dijumpai dalam Negara RIS ditiadakan. Senat RIS adalah institut Negara Federasi yang pada waktu itu mewakili Negara-negara/Daerah-daerah bagian. Dalam Negara Kesatuan, Daerah-daerah bagian itu tidak ada, maka Senat ditiadakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 DPR yang baru dibentuk ini mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk warganegara Indonesia, mempunyai seorang wakil. Anggota DPR menurut UUDS dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Golongan kecil Tionghoa, Eropa, dan Arab mempunyai wakil-wakil berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6, dan 3 orang.

Untuk pertama kali selama DPR belum tersusun dengan pemilihan menurut Undang-Undang, DPR terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RIS, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Senat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 77 UUDS).

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1950 Anggota-Anggota DPRS mengangkat sumpah menurut pasal 63 Undang-Undang Dasar Sementara dihadapan Presiden Soekarno di Istana Negara. Kemudian pada malam harinya dilakukan pelantikan DPRS oleh Presiden Soekarno bertempat di gedung DPR di Jalan Dr. Wahidin I Jakarta.

Berdasarkan pasal 77 UUDS tersebut di atas, maka jumlah anggota DPR Sementara adalah 236 orang dengan perincian sebagai berikut: 148 anggota dari DPRS RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari BP KNP, dan 13 anggota dari Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Yogya. Jap Tjwan Bng termasuk asal perwakilan dari DPR RIS dengan nomor anggota 116.<sup>30</sup>

Dari jumlah 236 orang anggota tersebut di atas setelah beberapa tahun berlangsung hanya tinggal 213 orang, karena ada anggota yang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Jap Tjwan Bing mengundurkan diri pada tanggal 17 Juli 1954 karena masalah keluarga. Salah satu anaknya sangat membutuhkan bimbingan ayahnya karena mengalami depresi mental.

Sebelum ia mengundurkan diri dari keanggotaan DPRS, ia sempat mengikuti pembicaraan program Kabinet Wilopo dan ikut menyumbangkan pikirannya terutama di bidang kemakmuran yaitu memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional.<sup>31</sup> Kabinet Wilopo ini dibentuk pada tanggal 3 April 1952 dan meletakkan jabatan pada tanggal 1 Agustus 1953, karena adanya keretakan dalam kabinet itu sendiri dan adanya masalah pembagian tanah di Sumatera Utara yaitu di Tanjung Morawa. Sesudah Jap Tjwan Bing mengundurkan diri dari anggota DPRS, ia digantikan oleh kawan seperjuangannya pada masa agresi militer kedua di Yogyakarta yaitu Tony Wen dari fraksi PNI. Tony Wen adalah juga kawan bermain bola sejak duduk di bangku sekolah menengah AMS Yogyakarta. Sejak itu Jap Tjwan Bing sudah tidak terdengar lagi dalam dunia percaturan politik.

## CATATAN

1. Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 227.
2. Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid I (Djakarta: Prapantja, 1960), hlm. 399.
3. Wawancara dengan Nyonya A.H. Nasution, tanggal 18 Juli 1985 di rumahnya Jalan Teuku Umar 41-42, Jakarta Pusat.
4. Wawancara dengan A.H. Nasution, tanggal 18 Juli 1985 di rumahnya Jalan Teuku Umar 41-42, Jakarta Pusat.
5. Mõhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Djakarta: Tinta Mas, 1970), hlm. 51; Wawancara dengan Teuku Mohammad Hassan, tanggal 19 Juli 1985, di rumahnya, Jakarta.
6. Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi jang Otentik dan Perumusan Pantjasila jang Otentik* (Djakarta: Dept. Hankam Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 8-12.
7. Mohammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* (Djakarta: Prapantja, 1959), hlm. 122-123.
8. *Ibid.*

9. Wawancara dengan Teuku Mohammad Hassan, tanggal 19 Juli 1985.
10. *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat DPR-GR, 1970), hlm 582; Wawancara dengan Otto Rondonuwu, tanggal 19 Juli 1985, di rumahnya Jalan Cilacap, Jakarta Pusat.
11. *Ibid*, hlm. 8-9.
12. *Ibid*; Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo, tanggal 8 Agustus 1985, di rumahnya Jalan Guntur, Jakarta.
13. Arsip BP KNP milik Wangsawidjaja (naskah diketik).
14. *Ibid*
15. Wawancara Karkono Partokusumo, tanggal 12 Agustus 1985, di rumahnya Jalan Dr. Sutomo 9A, Yogyakarta; Wawancara dengan Kesumo, tanggal 2 Agustus 1985 di rumahnya Jalan P. Senopati Yogyakarta.
16. *Republik Indonesia: Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jakarta: Departemen Penerangan R.I., 1959), hlm. 145.
17. Wawancara dengan Sudarisman Purwokusumo, tanggal 3 Agustus 1985, di rumahnya Jalan Cik Di Tiro 17, Yogyakarta.
18. Republik Indonesia: Propinsi DIJ . . . . . *loc. cit.*
19. *Ibid.*, hlm. 189.
20. *Ibid.*
21. Wawancara Sanusi Hardjadinata, tanggal 6 Agustus 1985, di rumahnya, Jl. Dr. Setyabudhi 78 Bandung.
22. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid VII (Bandung: Disjarah AD & Penerbit Angkasa, 1978), hlm. 175.
23. *Ibid.*, hlm. 178.
24. Wawancara dengan Prof. Mr. Soenario di rumahnya Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, tanggal 17 Juli 1985.
25. Seperempat abad . . . . . *op. cit.*, hlm. 93-94.
26. *Ibid*
27. Wawancara dengan Wangsawidjaja, tanggal 19 Juli 1985, di rumahnya Jalan Subang 18 Jakarta.

28. Seperempat abad . . . . . *op. cit.*, hlm. 135–136.
29. *Ibid.*, hlm. 600.
30. Wawancara dengan Otto Rondonuwu, tanggal 19 Juli 1985, di rumahnya Jalan Cilacap Jakarta Pusat.

## BAB V PRIBADI DAN NILAI PERJUANGAN JAP TJWAN BING

Pada akhir dari tulisan ini patutlah direnungkan tentang pribadi dan nilai perjuangan Drs. Jap Tjwan Bing.

Jap Tjwan Bing sebagai anak yang dilahirkan dari lingkungan keluarga Cina adalah anak zamannya yang tahu menjawab tantangan dan panggilan bangsanya dalam menghadapi penjajahan. Ia memiliki kepribadian yang kuat, jujur dan suka berterusterang.

Sejak masa mudanya, ia punya prinsip yang berlainan dengan kawan-kawan Cina lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, ia banyak bergaul dengan orang-orang pribumi. Rasa senasib, rasa kebersamaan, dan rasa nasionalisme, ternyata tidak lepas dari tanah kelahirannya, dan lingkungan pergaulannya. Tanah kelahiran, dan lingkungan pergaulan adalah bagian dari darah dan dagingnya, bagian yang ikut membentuk kehidupannya, kebiasaan serta sikap budayanya.

Ide-ide perjuangan sangat mengendap di hati sanubarinya, ketika ia duduk di AMS B Yogyakarta dan di Negeri Belanda.

Ia pulang ke Indonesia dengan menggondol gelar sarjana farmasi. Pada masa pendudukan Jepang ia berdomisili di Bandung sebagai pengelola apotik Sinuaraya. Di samping itu rasa kebangsaan tercermin dalam kegiatannya sebagai pengurus pemuda daerah Priangan, ikut aktif menentang pendudukan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang cina, tetapi sudah berbaur demi untuk kemerdekaan tanah air Indonesia.

Rasa kebangsaan yang begitu tinggi itu dibuktikan lagi, ketika ia duduk sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan ikut dalam rapat pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pada masa kemerdekaan, ia juga aktif dalam konperensi-konperensi. Dalam konperensi Indonesia dengan golongan Tionghoa pada tahun 1946 di Yogyakarta, ia menuangkan idenya agar bangsa Tionghoa sebagai bangsa Asia harus membantu bangsa Indonesia dalam gerakan menentang penjajah terutama di garis belakang yaitu menyiarkan melalui radio baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Tionghoa. Pernyataan ini juga didukung oleh tokoh nasionalis lainnya dari golongan Tionghoa seperti Ir. Tan Boen Aan, Mr. Tan Po Goan, dan lain-lainnya.

Keinginan Jap Tjwan Bing untuk berbaur demi persatuan dan kesatuan bangsa juga terlihat ketika dipilih sebagai Bendahara dalam Konperensi Indonesia-Belanda yang berlangsung di Yogyakarta bulan Peberuari 1947.

Di dalam diri Jap Tjwan Bing memang bersemayam jiwa nasionalisme, suatu jiwa yang manunggal antara kata dan perbuatan. Hal ini terlihat ketika ia duduk sebagai anggota DPR RIS tahun 1949 dan anggota DPRS tahun 1950.

Sebagai anggota DPR RIS yang mewakili golongan minoritas Tionghoa, ia ikut aktif berperan serta membicarakan dan menyelesaikan hal-hal yang menyangkut tuntutan untuk membubarkan Negara bagian dan menggabungkannya dengan Republik Indonesia Yogya, sedang sebagai anggota DPRS, ia ikut

aktif dalam program kabinet Wilopo. Ia menyumbangkan pikirannya terutama di bidang kemakmuran. Setelah itu ia mengundurkan diri. Sanusi Hardjadinata mengatakan, bahwa pada tahun 1955 Ia bertemu dengan Jap Tjawan Bing yang penampilannya terlihat agak murung. Apa yang melatarbelakangi kemurungannya? Ia menjawab, satu-satunya anak laki-laki menderita sakit yang serius, mungkin hanya bisa disembuhkan di luar negeri. Ternyata masalah keluarga sangat penting bagi dirinya. Untuk keperluan ini ia minta bantuan Sanusi Hardjadinata untuk mencarikan ijin pergi ke Amerika Serikat. Di samping itu, ia juga minta bantuan kepada kawan dekatnya dr. G. Siwabessy berupa rekomendasi untuk pengobatan anak laki-laknya di Amerika Serikat.

Akhirnya masalah keluarga bagi dirinya adalah segala-galanya, Ia menjual semua harta benda miliknya termasuk rumah dan tanah untuk persiapan pengobatan anaknya itu. Drs. Jap Tjwan Bing meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan bertempat tinggal di Amerika Serikat.

## BIBLIOGRAFI

- A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I & VII. Bandung : Disjarah AD & Penerbit Angkasa, 1978.
- Arsip Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (Naskah Ketikan), milik Wangsawidjaja.
- De Landbouwexportgewassen van Nederlandsch-Indie*. Batavia. Landsdrukkerij, 1938.
- Gelderens, van. *Voorlezingen over Tropisch-koloniale Staathuishoudkunde*. Harlem, 1927.
- Gutem, van. "Tjina Mindring", *Koloniale Studien*, 1919.
- H. Danusuparta & I Djumhur, *Sejarah Pendidikan*. Bandung: C.V. Ilmu, 1976.
- Khalid Rasyidi, *Pengantar Perjuangan Jaman Jepang sampai Proklamasi*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1975.
- Mohamad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, Djakarta: Tinta Mas, 1970.
- Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid I. Djakarta : Prapantja, 1960.
- , *Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Djakarta : Prapanca, 1960.

- Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi jang Otentik dan Perumusan Pantjasila yang Otentik*. Djakarta : Departemen Hankam Pusjarah ABRI, 1971.
- Republik Indonesia : Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*. Djakarta : Departemen Penerangan R.I., 1959.
- Sartono Kartodirdjo dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka, 1975.
- Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Repbulik Indone-sia*. Djakarta : Sekretariat DPR-GR, 1970.
- Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*, Jakarta. Yayasan Idayu, 1975.

## DAFTAR INFORMASI

N a m a	U m u r	A l a m a t
1	2	3
Jenderal (Purn) A.H. Nasution	67 th	Jalan Teuku Umar 40-42, Jakarta Pusat
Nyonya A.H. Nasution	55 th	Jalan Teuku Umar 41-42, Jakarta Pusat.
Karkono Partokusumo	59 th	Jalan P. Senopati, Yogya- karta.
K e s u m o	60 th	Jalan P. Senopati, Yogya- karta.
Otto Rondonuwu	70 th	Jalan Cilacap, Jakarta Pusat.
Prof. Mr. Soenario	85 th	Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.
Sanusi Hardjadinata	60 th	Jalan Dr. Setyabudhi 78, Bandung.
Soebadio Sastrosatomo	66 th.	Jalan Guntur, Jakarta.

---

101	102	103
S u d i r o	82 th	Jalan Teuku Umar 97, Jakarta Pusat.
Teuku Mohamad Hassan	82 th	Jakarta.
Sudirisman Purwokusumo	74 th	Jalan Cik di Tiro 17, Yogyakarta.
Wangsawidjaja	75 th.	Jalan Subang 18, Jakarta.

Lampiran 1

FOTO ANGGOTA PPKI



Sumber : Yayasan Idayu

## Lampiran 2

**KEANGGOTAAN DPR—RI**  
**DAFTAR ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT**  
**Pleno Ke—VI di Jogjakarta**

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
1.	Abdul Karim. H.	Masjumi	Surabaja
2.	Abdullah bin Nuh	..	Jogjakarta
3.	Abdul Fatah Hasan	..	Serang
4.	Abu Hanifah. Dr.	..	Sukabumi
5.	Ahmadin, H.	..	Jogjakarta
6.	Achmad Sanusi. H.	..	Sukabumi
7.	Aisjah Hilall	..	Jogjakarta
8.	Anwar Harjono	..	Jogjakarta
9.	Amin Djasuta, H.	..	Serang
10.	Badjuri Achmad	..	Malang
11.	Bagus Hadikusumo, Ki	..	Jogjakarta
12.	Benjamin. H. R.	..	Jogjakarta
13.	Burhanuddin Harahap	..	Jogjakarta
14.	Dahlan. H. M.	..	Pasuruan
15.	Darwis Thaib	..	Bukittinggi
16.	Djohar Arifin	..	S o l o
17.	Donggio. Moch.	..	Sidoredjo
18.	Fakih Oesman, Moch.	..	S o l o
19.	Farid Ma'roef	..	Jogjakarta
20.	Gaffar Ismail. A.	..	Bukittinggi
21.	Halim. K. A. H.	..	Purwokerto
22.	Hasan Aidid	..	T e g a l
23.	H a s i m. H.	..	Jogjakarta
24.	Dam Gozali. H.	..	S o l o
25.	Kafrawi. Moehammad	..	Surabaja
26.	Kamil Kartoprodjo	..	Tjirebon
27.	Kartosudarmo	..	Jogjakarta

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
28.	Kasmat. Mr. A.	..	Jogjakarta
29.	Kartosuwirjo. M.	..	Garut
30.	Mahmudah Masjhud. Nj.	..	Solo
31.	Mashudi	..	Bodjonegoro
32.	Muliadi Djojmartono	..	Solo
33.	Moezakkir, Abdulkahar	..	Jogjakarta
33.	O e d i n	..	Sumatera Tengah
35.	Oesman. H.	..	Jogjakarta
36.	Prawoto Mangkusasmito	..	Jogjakarta
37.	Pudjotomo. Nj.	..	Jogjakarta
38.	Roedjito. R.	..	Jogjakarta
39.	Roosbandi, Mr.	..	Jogjakarta
40.	Samaoen Bakri	..	Serang
41.	Saifudin Zuchri	..	Magelang
42.	S a l e h. Moh.	..	Jogjakarta
43.	Sardjan, Moehammad	..	Kediri
44.	Sjadli Hasan	..	Banten
45.	S i g i t, Drs. A.	..	Jogjakarta
46.	Siswosoedarmo	..	Solo
47.	Sjoekri, K. H. M.	..	Malang
48.	Soedjono	..	Djakarta
49.	S u j o s o	..	Kediri
50.	Sumaatmadja. R. O.	..	Sukabumi
51.	Sunarjo Mangunuspito, Nj.	..	Jogjakarta
52.	Soeprapto. R.	..	Malang
53.	Surjana Prawira, R. S.	..	Purwakarta
54.	Surowijono, S.	..	Malang
55.	Sutisna Sendjaja	..	Malang
56.	Toha Machsoen	..	Lamongan
57.	Taufik Qurachman, Kyai	..	Jogjakarta
58.	Wachidah Sukidjo	..	Jogjakarta
59.	Wahid. H. Moechamad	..	Djombang
60.	Zainul Arifin	..	Jogjakarta
61.	Abdoel Sukiman	P. N. I.	Bodjonegoro

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
62.	Awibowo	..	Jogjakarta
63.	Danuasmoro R. W.	..	Jogjakarta
64.	Darjono. R. M.	..	Jogjakarta
65.	Djody Gondokusumo. Mr.	..	Jogjakarta
66.	Gatot Mangkupradja	..	Jogjakarta
67.	Hadikusumo. S.	..	Poerwokerto
68.	Hadiprabowo Mochasim Malagoa	..	Jogjakarta
69.	Isnaeni. Mh.	..	Jogjakarta
70.	Joesopadi, Nj.	..	Jogjakarta
71.	Manai Sophiaan	..	Joajakarta
72.	Maramis. A. J.	..	Djakarta
73.	Masjhoed Hardjokusumo	..	Semarang
74.	Njonoprawoto	..	M a l a n g
75.	Noer St. Iskandar	..	Djakarta
76.	Oetojo Koesoemo	..	P a t i
77.	Poeger. R.	..	Surabaya
78.	Queljoe, P. de	..	Jogjakarta
79.	Ruspondji Atmowirono	..	S o l o
80.	Sabilal Rasjad glr. Dt. Bendaharo	..	Jogjakarta
81.	Sadji Sastro (Sardjo)	P. N. I.	Jogjakarta
82.	Safioedin Surjo Amidarmo	..	Surabaya
83.	Sjamsi Sastrowidagdo, Dr.	..	M a l a n g
84.	Sardjono. Ir.	..	Surabaya
85.	Sarpan	..	Magelang
86.	Sartono, Mr.	..	Jogjakarta
87.	Sidik Djojokusarto	..	K e d i r i
88.	Sjamsudin St. Makmur	..	Jogjakarta
89.	Slamet Soedibjo. Dr.	..	Djakarta
90.	Soeharto. Dr. R.	..	Medan
91.	Sudarman Hadikusumo, Nj.	..	Jogjakarta
92.	Soehoed	..	Jogjakarta
93.	Sujono Hadinoto Brotokusumo. Mr.	..	Jogjakarta
94.	Sumanang, Mr.	..	Jogjakarta
95.	Soemosoediro, Ng.	..	Djakarta

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
96.	Soenarjo, Mr.	„	Jogjakarta
97.	Soepardjo, Nj.	„	S o l o
98.	Soetardjo Hadisoetirto, Rd.	„	Jogjakarta
99.	Soetarman, Nj.	„	Jogjakarta
100.	Soetedjo Dirdjosebroto	„	Jogjakarta
101.	Soembadji, Dr.	„	Jogjakarta
102.	Tabrani, M.	„	Joajakarta
103.	Tjokroatmodjo, Dr. S.	„	Jogjakarta
104.	Wahid St. Radja Lalo	„	Djakarta
105.	Waloejo, Ir.	„	Jogjakarta
106.	Assaat glr. Datuk Mudo	P. Sosialis	Jogjakarta
107.	Bambang Soeparto, K. Ng	„	Surabaya
108.	D j a d i	„	—
109.	Djawoto	„	Djakarta
110.	Djohan Sjaroezah	„	Jogjakarta
111.	Djoeir Mohamad	„	Sumatera
112.	Joesoef Jahja	„	Djakarta
113.	Koesnaeni	„	Purwakarta
114.	Mardjoeki, R. N. M.	„	Jogjakarta
115.	Moedikdio, Nj.	„	M e d a n
116.	M o e r a d, T. A.	„	Djakarta
117.	Moewaladi, Mr.	„	Jogjakarta
118.	M o t i k. B. R.	„	Djakarta
119.	N a s e h	„	Tasikmalaja
120.	Noeroellah	„	M a l a n g
121.	Rachim A.	„	Jogjakarta
122.	Reksodipoetro, Mr. S.	„	Djakarta
123.	R o e h a n	P. Sosialis	—
124.	Sadikoen, Dr. S.	„	P a l e m b a n g
125.	S a m i d i n	„	Wates Jogjakarta
126.	Samodro	„	Jogjakarta
127.	Sardjono. S.	„	Tjirebon
128.	S a s t r a	„	Jogjakarta
129.	Soebadio Sastrosatomo	„	Jogjakarta

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
130.	Soedjono. R.	..	Jogjakarta
131.	Soegondo Djojopuspito	..	Jogjakarta
132.	S o e g r a	..	Djakarta
133.	Soehadi Hadikartono	..	S o l o
134.	Soekarto. R.	..	Poerwokerto
135.	Soemartojo	..	Djakarta
136.	Soetan Takdir Alisjahbana, Mr.	..	Djakarta
137.	T a m z i l, Mr.	..	Jogjakarta
138.	Tan Ling Djie, Mr.	..	Jogjakarta
139.	Tauchid, Moehammad	..	Jogjakarta
140.	Suprpto	..	--
141.	Wangsa Widjaja, I.	..	Jogjakarta
142.	Abidin, Prof. S, M,	P. B. I.	Jogjakarta
143.	A s m o e	..	P a t i
144.	Atim Soetopo	..	Jogjakarta
145.	Dalijono, Mr. Moh.	..	S o l o
146.	Djajoes	..	S o l o
147.	Djonhar	..	K e d i r i
148.	Enoch. Moch.	..	S u b a n g
149.	Fatkoer	..	Madioen
150.	HArtojo	..	S o l o
151.	I s b a n d i	..	Surabaja
152.	I s k a k	..	Jogjakarta
153.	Moedjono, R.	..	Jogjakarta
154.	Moesirin	..	Jogjakarta
155.	N j o n o	..	Jogjakarta
156.	Oemar Sapari	..	Jogjakarta
157.	Prawirowirjono	..	Bodjonegoro
158.	S a d o n o	..	S o l o
159.	Sandjojo	..	Bodjonegoro
160.	Sardjono, Nj. Umi Suharti	..	Kepandjen
161.	Satrio, Dr.	..	Jogjakarta
162.	Sjamsoe Harjo Oedojo	..	Jogjakarta
163.	Soebarmin Adividjojo	..	Jogjakarta

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
164.	Soedarto Josohandoko	..	Jogjakarta
165.	Soedjoed	..	Madiun
166.	Soekanto	..	Jogjakarta
167.	Soemoedi Mangunsandjojo	..	Jogjakarta
168.	Soenardi Adiwirjono	..	Jogjakarta
169.	Soenarjo Prodjowardojo	..	Jogjakarta
170.	Soengkono	..	K e d i r i
171.	Soepiman	..	K e d i r i
172.	Soewarti, Nn.	..	Jogjakarta
173.	Soewignjo Hadiatmodjo	..	Magelang
174.	Tjugito	..	M a d i u n
175.	Trimoerty, Nj. S. K.	..	Jogjakarta
176.	A i d i t, D. N.	P. K. I.	S o l o
177.	Ali Moehammad	..	Banten
178.	Alimin	..	S o l o
179.	Baharoedin	..	S o l o
180.	Basiran	..	Modjkerto
181.	B a s u k i	..	Sukabumi
182.	Dirdjoesoeparto	..	P a t i
183.	Djoemiran	..	Djombang
184.	Djamaloedin	..	Basoeeki
185.	Hasan Raid	..	Jogjakarta
186.	Hoetomo Soepardan	..	Madiun
187.	K o e b e s	..	Indramayu
188.	Lau King Hoo	..	Djember
189.	N a h a r	..	K e d i r i
190.	Ngadiman Hardjoseparto	..	Jogjakarta
191.	U t a r j o, S.	..	Magelang
192.	Prawiroasmicro	..	K e d i r i
193.	Prio Soejoto	..	Bodjonegoro
194.	Sanusi, Moech.	..	Djakarta
195.	Sardjono	..	S o l o
196.	S l a m e t	..	P a t i
197.	Soedihijat	..	Jogjakarta

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
198.	Soedjadi	”	Magelang
199.	Soejitno	”	Madiun
200.	Soejitno Renohadiwirjo	”	M a l a n g
201.	Soekadis, R.	”	Sukabumi
202.	Soekimah Alirachman, Nj.	”	K e d i r i
203.	Soemarno	”	M a l a n g
204.	Soerip	”	Magelang
205.	Soerojo	”	D j o m b a n g
206.	Tarsono	”	Bodjonegoro
375.	Hadipranoto	”	S o l o
376.	Hadisoemarta	”	Jogjakarta
377.	Hartono Sastrahamidjaja	”	Jogjakarta
378.	K a b o e l, M.	”	M a l a n g
379.	K a m i d	”	Jogjakarta
380.	K a r d a n	”	Pekalongan
381.	R e d j o	Buruh	Jogjakarta
382.	R i a t i	”	Surabaya
383.	Saikin	”	Jogjakarta
384.	Sardjana Surahudaja	”	Jogjakarta
385.	Sastradihardja, Moh.	”	Jogjakarta
386.	Soebandi, Rd.	”	Jogjakarta
387.	Soedjono	”	Bodjonegoro
388.	Soemardjo	”	Jogjakarta
389.	Soemarsono	”	Jogjakarta
390.	Soenarso, R.	”	M e d a n
391.	Soeni, Roro	”	Bodjonegoro
392.	Soeparna Sastradiredja	”	—
393.	Soepranoto	”	Djakarta
394.	Soeprapto	”	S o l o
395.	Soerjono	”	Badjonegoro
396.	Soerjosoebroto	”	K e d i r i
397.	Soesanto, Rd.	”	Jogjakarta
398.	Werdojo, K.	”	Jogjakarta
399.	Widojoko, Md.	”	Rembang

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
400.	Wirosuebrotto, K. Gunawan	„	Jogjakarta
401.	Zachrie, Abdullah	„	Priangan
402.	Abdullatief, H.	T a n i	Pekalongan
403.	Abdulrachman Wangsadikarta	„	Djakarta
404.	A m b j a h	„	M a l a n g
405.	A s m o	„	Djember
406.	D a m i r i	„	K e d u
407.	Hasmosoewigno	„	—
408.	Darmosoemarto	„	Bondowoso
409.	Hadibrotto	„	Jogjakarta
410.	Istiadjid	„	Jogjakarta
411.	K a s t o e r a	„	B a n d u n g
412.	Marsidik	„	K e d u
413.	Mashadidjojo	„	P a t i
414.	Moersid Safioedin	„	Pandeglang
415.	HAtawidjaja, K.	„	Tasikmalaja
416.	Niti Sumantri	„	B a n d u n g
417.	O e t o m o	T a n i	B l o r a
418.	Poespodadmojo, Moh. Padli	„	Probolinggo
419.	Rachman, A.	„	Djepara
420.	Ranie Soelaiman	„	Poerwokerto
421.	Ridwan, Moh.	„	K e d i r i
422.	Sadjarwo	„	Jogjakarta
423.	Sadjimo	„	Bodjonegoro
424.	Sjafie, Moh.	„	B a n d u n g
425.	Sajoga	„	Jogjakarta
426.	Sanairmihardja	„	Modjokerto
427.	Slamet Atmosoedibjo	„	Jogjakarta
428.	Soedirdjo, S.	„	Semarang
429.	Soedjono	„	Madiun
430.	Soegiarto	„	Jogjakarta
431.	Soehardi	„	K e d i r i
432.	Soejitno Padmowidagdo	„	S o l o
433.	Soekanda	„	Tjirebon

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
434.	Sukoso Wirjosapoetro	”	Poerwokerto
435.	S o e m a r n o	”	Tjirebon
436.	Soendjoto	”	Surabaja
437.	Soeradiwidjaja	”	G a r u t
438.	Soesanto, H.	”	—
439.	T a k r i p	”	K e d i r i
440.	Tanoedibrata, R.	”	Djakarta
441.	Waranan Sujitno	”	Djakarta
442.	Abdoel Hakim	Sumatera	Sibolga—Tapanuli
443.	Abdul Karim, M. S.	”	Langsa Atjeh
444.	Abdullah Joesoef	”	Siantar
445.	Abdulrahim Oesman, Dr.	”	Bukittinggi
446.	Abdoerrahman Sjihab. H.	”	Tapanuli
447.	Achmad Noer Nasoetion	”	Jogjakarta
448.	Agoes Salim	”	”
449.	Ali Rahman	”	”
450.	Ali Hasjmy	”	Kutaradja—Atjeh
451.	A m e l z.	”	”
452.	Anwar. Mohamad	”	Palembang
453.	Alihamzah. H.	”	”
454.	Arifin. A	”	”
455.	Bachtaroedin	”	”
456.	B a s r i	”	Palembang
457.	Basunie Saropie	”	Palembang
458.	Chanafiah, Moehamad Ali	”	Bengkulen
459.	Hasan Mukin	Sumatera	D j a m b i
460.	Herman Siahaan, C.	”	T. Tinggi
461.	Iskandar tedjasukmana	”	Jogjakarta
462.	I s m a i l	”	T Karang/Lampung
463.	Jahja Jacoeb	”	”
464.	Jusin Achmad	”	T Karang/Lampung
465.	Junan Nasution. M.	”	Kutaradja
466.	Joesoef Abdullah, Moh	”	T. Tinggi
467.	Karim, Nj. Noerbaiti D.	”	Bukittinggi

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
468.	Kario Siregar	„	Jogjakarta
469.	Luat Siregar, mr.	„	Jogjakarta
470.	Mangaradja Dhoetan	„	B. Tinggi
471.	Marzuki Jatim	„	B. Tinggi
472.	Moechtar Jahja	„	B. Tinggi
473.	Melanchton Siregar	„	P. Siantar
474.	Petroes Samosir	„	P. Siantar
475.	Poesposutjipto	„	Jogjakarta
476.	Rasuna Said, Rangkajo	„	Jogjakarta
477.	Saohoka, J. N.	„	Tebing Tinggi
478.	Sarwono Sastra Noetardjo	„	Langsa—Atjeh
479.	Siagian, M. L.	„	D e l i
480.	Simatupang	„	Semarang
481.	Sinaga, Dr. H.	„	Djakarta
482.	Siradjoeddin Abbas, H.	„	Bukit Tinggi
483.	Slamet. R.	„	Pekan Baru
484.	Seohardjo	„	Lubuklinggau Palembang
485.	Soetan Mansoer, A. R.	„	Jogjakarta
486.	Soetikno Padmosumarto	„	Kutaradja—Atjeh
487.	Tarigan, S. M.	„	Langsa—Atjeh
488.	Tjiwan, K. H.	„	Sumatera Barat
489.	Wasito, Dr.	„	Batang Taru Tapanuli
490.	Zainal Abbdin Achmad	„	Jogjakarta
491.	Zainul Baharudin	„	Jogjakarta
492.	Charidji Kasuma, G. M.	Kalimantan	Jogjakarta
493.	Goesti Djohan	„	Jogjakarta
494.	Koesmuljono	„	—
495.	Machmud. A.	„	Djakarta
496.	Maizir Achmaddyns	„	Semarang
497.	Moeis. H. G. A.	„	Jogjakarta

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
498.	Sanusi Galib, Dr.	„	Sumedang
499.	Tjilik Riwoet	Kalimantan	Jogyakarta
500.	Abdul Razak	Sulawesi	Jogyakarta
501.	Audi Penjami	„	Jogyakarta
502.	Andi Magga Amirullah	„	Semarang
503.	Bebasa Daeng Lalo	„	Djakarta
504.	Jasin. Moh.	„	Pekalongan
505.	Joenoës Mattaliti, Moh.	„	Madiun
506.	Kesyungan, E.	„	Surabaya
507.	Machmud L. Latjuba	„	Jogyakarta
508.	M e n d u r, A. L.	„	—
509.	Paath, V. R.	„	Djakarta
510.	Posik, W. J. D.	„	Djakarta
511.	Ratulangi, A. R. S. D.	„	Djakarta
512.	Ratulangi, Nona Zus	„	Djakarta
513.	Rondonuwu, O.	„	Jogyakarta
514.	Saad, Moh.	„	Djakarta
515.	Supit, A. J.	„	—
516.	Fretes, J. D. de	Maluku	Djakarta
517.	Jaups. R. J.	„	Djakarta
518.	Padang, Moh.	„	M a l a n g
519.	Patty. A. J.	„	Jogyakarta
520.	Samalo, Dr. L. G. J.	„	—
522.	Syaranammual. J. D.	„	Jogyakarta
523.	P a h i j a. A.	„	—
524.	I Gusti Gde Raka	Sunda-Kecil	—
525.	Johannes, Ir. H.	„	Jogyakarta
526.	Leziangi Laxarus	„	Djakarta
527.	L o b o. I. R.	„	Jogyakarta
528.	P e l l o, A. S.	„	Jogyakarta
529.	Budja Wiria Tegehkari	„	—
530.	Inje Beng Hoat	Golongan — Minoritet (Tionghoa)	

No. Urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
531.	Liem Koen Hian	”	—
532.	Ong Eng Die, Dr.	”	—
533.	Siauw Giok Tjhan	”	Jogjakarta
534.	Tan Boen Aan, Ir.	”	Bondowoso
535.	<b>Yap Tjwan Bing, Drs.</b>	”	B a n d u n g
536.	Bajasub. A.	Golongan Minoritet (Arab)	—
537.	Hamid Algadrie	”	Djakarta
538.	Oemar bin Salim Hubeis	”	Surabaja
539.	H a g e, D.	Golongan Minoritet (Eropah)	Djakarta

**DAFTAR ANGGOTA SENAT R.I.S.**  
**15 Februari – 16 Agustus 1950**

No. Urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/djandji	Keterangan lain-lain
1.	Mr. Sumanang	Neg. Republik Indonesia (Jogja)	16-2-1950	
2.	Mr. Teuku Mohammad Hassan	- " -	16-2-1950	Terpilih sebagai Wakil Ketua Senat RIS.
3.	Sultan Kaharuddin	Neg. Indonesia Timur.	16-2-1950	Mengundurkan diri
4.	M. A. Pellaupessy	- " -	16-2-1950	Terpilih sebagai Ketua Senat RIS.
5.	Ir. R. H. Mohd. Enoch	Neg. Pasundan	16-2-1950	
6.	M. Ardiwinangun	- " -	16-2-1950	
7.	R. A. A. Soejadi	Neg. Djawa Timur	16-2-1950	
8.	Roeslan Wongsokoesoemo	- " -	16-2-1950	Mengundurkan diri.
9.	M. Gondosoewandito	Neg. Madura		
10.	R. Abdoerrasid Koesoemodiwirjo	- " -	16-2-1950	Mengundurkan diri.
11.	Mr. Djaidin Peorba	Neg. Sumatera Timur	16-2-1950	
12.	Ngeradjai Meliala	- " -	16-2-1950	
13.	Raden Hanan	Neg. Sumatera Selatan	20-2-1950	
14.	Bustan Urip	- " -	16-2-1950	
15.	Dr. R. V. Sudjito	Daerah Djawa Tengah	16-2-1950	
16.	Sarino Mangunpranoto	- " -	16-2-1950	
17.	Sulaiman Dzen	Daerah Bangka	16-2-1950	
18.	Mr. Tjoeng Tin Jan	- " -	16-2-1950	
19.	Aboebakar	Daerah Belitung	20-2-1950	
20.	Mohd. Saad	- " -	16-2-1950	
21.	Mohd. N o h	Daerah Riau	16-2-1950	
22.	Machmud	- " -	16-2-1950	Mengundurkan diri.
23.	A. Djaelani	Daerah Istimewa Kalimantan Barat	16-2-1950	
24.	R. Abubakar Ariadiningrat	- " -	16-2-1950	
25.	Mochran b. Hadji Ali	Daerah Dajak Besar	16-2-1950	
26.	Helmuth Kunum	- " -	16-2-1950	

No. Urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain-lain
27.	A. A. Rivai	Daerah Banjar	5-4-1950	Pengganti tjalon anggota Hadji Raden.
28.	Mr. Boerhanoedin	- „ -	16-2-1950	
29.	Mr. Tadjoeeddin Noor	Daerah Kalimantan Tenggara	16-2-1950	
30.	M. J a m a n i	- „ -		Belum mengangkat sumpah.
31.	A. R. Djokoprawiro	Daerah Kalimantan Timur	16-2-1950	
32.	A.B.M. Jusuf	- „ -	16-2-1950	

**DAFTAR ANGGOTA D.P.R. — R. I. S.**  
**15 Februari — 16 Agustus 1950**

No. Urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain-lain
1.	Abdullah Juruf	Neg. Republik Indonesia (Jogja)	17-2-1950	
2.	Ahem Erningpradja	— „ —	17-2-1950	
3.	Arudji Kartawinata	— „ —	17-2-1950	
4.	A m e l z	— „ —	17-2-1950	
5.	Amri Jara	— „ —	17-2-1950	Terpilis sebagai Wakil Ketua II DPR—RIS.
6.	B a s r i	— „ —	17-2-1950	
7.	Benjamin, Hadji	— „ —	17-2-1950	Meninggal dunia di Jogjakarta tanggal 4 Djuli 1950.
7.a	Hadikusumo, Ki Bagus	— „ —	—	Pengganti Hadji Benja- min alm. Belum men- gangkat sumpah.
8.	Goesti Abdul Moeis	— „ —	17-2-1950	
9.	Hamid Algadrie	— „ —	17-2-1950	
10.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	— „ —	17-2-1950	
11.	Jusuf Muda Dalam, Teuku	— „ —	17-2-1950	
12.	Jusuf Wibisomo, Mr.	— „ —	17-2-1950	
13.	Kasimo, I.J.	— „ —	17-2-1950	
14.	Koesnan, Rh.	— „ —	3-4-1950	
15.	Latuharhary, Mr. J.	— „ —	17-2-1950	
16.	L o b o, I. R.	— „ —	17-2-1950	
17.	Lukman Wiriadinata, Mr.	— „ —	17-2-1950	
18.	Manai Sophiaan	— „ —	17-2-1950	
19.	Maruto Nitimihardjo	— „ —	17-2-1950	
20.	Mohd. Dalijono, Mr.	— „ —	17-2-1950	
21.	Mohd. Natsir	— „ —	17-2-1950	
22.	Mohd. Noer El Ibrahimy	— „ —	17-2-1950	
23.	Mohd. Padang	— „ —	17-2-1950	
24.	Mohd. Tauchid	— „ —	17-2-1950	
25.	Moedikdio (Njonja)	— „ —	17-2-1950	
26.	Muhd. Yamin, Mr.	— „ —	17-2-1950	
27.	M u s t a f a	— „ —	17-2-1950	
28.	Ngadiman H Ardjosubroto	— „ —	17-2-1950	
29.	Peris Pardede	— „ —	17-2-1950	
30.	Rondonuwu, O,	— „ —	17-2-1950	

No. Urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/djandji	Keterangan lain-lain
31.	Said Ali, Sutan	- ,, -	17-2-1950	
32.	Sakirman, Ir.	- ,, -	17-2-1950	
33.	Saleh Umar	- ,, -		Belum mengangkat sumpah.
34.	Sartono, Mr.	- ,, -	17-2-1950	Terpilih sebagai Ketua DPR RIS.
35.	Sarwono Sastro Sutardjo	- ,, -	17-2-1950	
36.	Siauw Giok Tjhan	- ,, -	17-2-1950	
37.	S i n a g a, Dr. H.	- ,, -	17-2-1950	
38.	Siradjuddin Abbas, Hadji	- ,, -	17-2-1950	
39.	Subadio Sastrosutomo	- ,, -	17-2-1950	
40.	Sujono Hadinoto, Mr.	- ,, -	17-2-1950	
41.	Sukiman Wirjosandjojo Dr.	- ,, -	17-2-1950	
42.	Soenarjati Soekemi (Njonja)	- ,, -	17-2-1950	
43.	S u w a r t i (Nona)	- ,, -	17-2-1950	
44.	Tambunan, Mr. A. M.	- ,, -	17-2-1950	Terpilih sebagai Wakil Ketua I DPR - RIS.
45.	Tjokronegoro Dr. A.	- ,, -	17-2-1950	
46.	Tjikwan, K. H.	- ,, -	17-2-1950	
47.	Werdojo, Karsono	- ,, -	17-2-1950	
48.	Yap Tjwan Bing, Drs.	- ,, -	20-2-1950	
49.	Yunan Nasution, M.	- ,, -	17-2-1950	
50.	Zainal Abidin Ahmad	- ,, -	17-2-1950	
51.	Andi gappa	Neg. Indonesia Timur	17-2-1950	
52.	Andilolo, A. D.	- ,, -	17-2-1950	
53.	Bachmid, A. S.	- ,, -	17-2-1950	
54.	Dauhan, G. E.	- ,, -	17-2-1950	
55.	J a m c o, R.	- ,, -	24-2-1950	
56.	L a s u t, R. C.	- ,, -	2-3-1950	
57.	Manoppo, A. C.	- ,, -	17-2-1950	
58.	Manuaba, I. B. P.	- ,, -	2-3-1950	
59.	Manteiro, L. F.	- ,, -	25-2-1950	
60.	Oli-i, T	- ,, -	25-2-1950	
61.	P i t o i, A. F. P.	- ,, -	17-2-1950	
62.	Pupella, E. U.	- ,, -	17-2-1950	
63.	R o t t i, Ds. A.	- ,, -	17-2-1950	
64.	Suhettapy Engel, B.	- ,, -	17-2-1950	
65.	Sonda Daeng Mattajang	- ,, -	17-2-1950	
66.	Teng Tjin Leng, Mr.	- ,, -	17-2-1950	
67.	W a r o h, A. (Njonja)	- ,, -	20-3-1950	

No. Urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/djandji	Keterangan lain-lain
68.	Achsien, A. A.	Neg. Pasundan	--	Ditundjuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerdjja.
69.	Anwar Tjokrominoto	-- ,, --	--	K.N.P. No. 25A/1950 tanggal 25-5-1950
70.	Djerman Prawirawinata. R.		--	tentang "Peraturan tentang Penundjukan Anggota-anggota DPR Sementara RIS Utusan Daerah Pasundan.
71.	Kadmiraah Karnadidjaja	-- ,, --	--	Belum mengangkat sumpah.
72.	Mohd. Isa Anshary	-- ,, --	--	
73.	Musirin Sosrosubroto	-- ,, --	--	
74.	N a w a w i	-- ,, --	--	
75.	Pandu Kartawiguna	-- ,, --	--	
76.	Sunario, Mr.	-- ,, --	--	
77.	Suparno, R.	-- ,, --	--	
78.	Sutarto Hadisudibjo, R. H.	-- ,, --	--	
79.	Abdurachman wangsadikata R.	-- ,, --	--	
80.	Abulhajat	-- ,, --	--	
81.	Achmad Sumadi	-- ,, --	--	
82.	Sidik Kartapati	-- ,, --	--	
83.	Emon Bratawidjaja, R.	-- ,, --	--	
84.	Jaman Sudjana Prawira	-- ,, --	--	
85.	Wardi Kusnatalistra	-- ,, --	--	
86.	S u m a r d i	Neg. Pasundan		
87.	Ateng Kartanahardja	Neg. Djawa Timur	17-2-1950	
88.	Arso Sosroatmodjo	-- ,, --	17-2-1950	
89.	Augustin, Mr. W.	-- ,, --	17-2-1950	Mengundurkan diri tanggal 17 April 1950.
90.	Djaswadi Suprpto R.	-- ,, --	17-2-1950	
91.	Dradjad Partoatmodjo, Dr.	-- ,, --	17-2-1950	
92.	Indra Kasuma, Mr.	-- ,, --	7-8-1950	
93.	Farid Alwi Isa, Hadji	-- ,, --	17-2-1950	
94.	L a n g k a i, J.	-- ,, --	17-2-1950	
95.	Pranoto, R. S.	-- ,, --	24-7-1950	
96.	Said Bahreisi	-- ,, --	17-2-1950	
97.	Saroso Harsono, R.	-- ,, --	17-2-1950	
98.	Sudarnadi, M.	-- ,, --	17-2-1950	
99.	Surjaningprodjo, R. T.	-- ,, --	17-2-1950	
100.	Tan Boen Aan, Ir.	-- ,, --	17-2-1950	

No. Urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/djandji	Keterangan lain-lain
101.	Tjoa Sie Hwie, Mr.	- ,, -	17-2-1950	
102.	Bagioadi Mantjanegara, R,	Neg. Madura	17-2-1950	
103.	Kaharkusmen Sosrodanukusumo, Rd.	- ,, -	17-2-1950	
104.	Mohd. Ersat Trunodjojo	- ,, -	17-2-1950	
105.	Mohd. Machfud	- ,, -	17-2-1950	
106.	Mohd. Zainal Alim	- ,, -	17-2-1950	
107.	Nerus Ginting Suka	Neg. Sumatera Timur	17-2-1950	
108.	Muhd. N u h	- ,, -	17-2-1950	
109.	R a m l i, O. K.	Neg. Sumatera Timur	17-2-1950	
110.	S i n a g a, Philemon	- ,, -	17-2-1950	
111.	Ahmad Azhary, K. H.	Neg. Sumatera Selatan	17-2-1950	
112.	Mohd. Hasan	- ,, -	17-2-1950	
113.	Mohd. N u h	- ,, -	17-2-1950	
114.	Mohd. Saddak	- ,, -	17-2-1950	
115.	Adhisukmo, R. S.	Daerah Djawa Tengah	17-2-1950	
116.	Emor Djajadinata, R.	- ,, -	17-2-1950	
117.	E n d o n, Dr.	- ,, -	17-2-1950	
118.	Hidajat Prawirodiprodjo R.M	- ,, -	17-2-1950	
119.	Ibnutadji Prawirosudirdjo	- ,, -	17-2-1950	
120.	Mohd. Ilias, Hadji	- ,, -	17-2-1950	
121.	Prawoto Sudibjo, S.	- ,, -	17-2-1950	
122.	Rondonuwu, A.	- ,, -	17-2-1950	
123.	Slamet Tirtosumarto, R.	- ,, -	17-2-1950	
124.	Sugih Tjokrosumarto, R.	- ,, -	17-2-1950	
125.	Trenggono, Dr. S. Hadibowo	- ,, -	17-2-1950	
126.	Th. van der Lee	- ,, -	---	Tjalon anggota Th van der Lee belum menandatangani surat-surat kepertjajaannya (penundjukan sebagai anggota dan surat keterangan sebagai warganegara Indonesia).
127.	Abdul Samad	Daerah Bangka	17-2-1950	
128.	Jusuf Rasidi, A. M.	- ,, -	17-2-1950	
129.	Abdullah Aidit	Daerah Belitung	17-2-1950	
130.	Djohar, K. A.	- ,, -	17-2-1950	

No. Urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/djandji	Keterangan lain-lain
131.	Achmad, Tengku	Daerah Riau	17-2-1950	
132.	Mohd. Noer	- ,, -	23-2-1950	Meninggal dunia di Tandjung Pinagng tgl. 21 Mei 1950.
133.	Djohan, Ade Mohd.	Daerah Istimewa Kalimantan Barat	17-2-1950	
134.	Palaunsoeka, F. C.	- ,, -	17-2-1950	
135.	Sudarso, Dr. M.	- ,, -	17-2-1950	
136.	Tjoeng Lin Sen	- ,, -	17-2-1950	
137.	Kunum Kusumojudo, E.	Daerah Dajak Besar		
138.	Cyrrillus Kersanegara, R.	- ,, -	--	Pengganti tjalon anggoa Basuni, belum mengangkat sumpah.
139.	Diapari, D. S.	Daerah Bandjar	22-3-21950	
140.	Idham Chalid	- ,, -	22-2-1950	
141.	Hasan Basri	- ,, -	22-3-1950	
142.	Andi Zainal Abidin	Daerah Kalimantan Tenggara	17-2-1950	
143.	Gusti Djohan	- ,, -	17-2-1950	
144.	Moeis, I. A.	Daerah Kalimantan Timur	17-2-1950	
145.	Rasjid St. Radja Emas	- ,, -	17-2-1950	
146.	Mohd. Yatim Jacin	S a b a n g	22-3-1950	
147.	Ibrahim Sedar	Kotawaringin	22-3-1950	
148.	Mayor Polak, J.B.A.F.	Golongan Ketjil	5-4-1950	Diangkat dengan Kep. PRes. RIS No. 84/1950 tgl. 23-2-1950.
149.	Schmitz, G. R.	- ,, -	6-3-1950	- ,, -
150.	S n e l, J. P.	- ,, -	6-3-1950	- ,, -
151.	Nieuwenhuysen. W. M.	- ,, -	23-5-1950	Diangkat dengan Kep. Pres. RIS No. 94/1950 tgl. 26-2-1950.

**DAFTAR ANGGOTA D.P.R. SEMENTARA**  
**16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956**

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan		Keterangan lain-lain	
1.	Abdullah Aidit	195	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950 Mengundurkan diri tanggal 16-6-1954.
2.	Abdullah Jusuf	123	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
3.	Abdul Samad	194	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
4.	Abdulwahab Chasbullah K.H.	9	D.P.A.	--		Sumpah tgl. 9.12.1950.
5.	Abdurachman Wangsadikata, R.	232	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
6.	Abidin, Prof. S.M.	43	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-12-1954.
7.	A b o e b a k a r	29	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 18-9-1950.
8.	Abubakar Ariadiningsrat, R.	33	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
9.	A b u l h a j a t	233	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
10.	Achmad, Tengku (lengkap: Achmad bin Tengku Atau, Tengku)	197	DPR	--	RIS	Belum/tidak mengang- kat sumpah. Mengundurkan diri tanggal 25-6-1950.
11.	Achmad Sumadi	228	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 22-8-1950.
12.	Achsien, A. A.	216	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
13.	Adhisukmo, R. S.	192	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Dja- karta tgl. 6-2-1954.
14.	Adnan, K. H. Mohd.	6	D.P.A.	--		Sumpah tgl. 16-8-1950.
15.	Ahem Erningpradja	111	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
16.	Ahmad Azhary, K. H.	179	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
17.	A m e l z	126	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
18.	Amri Jara	130	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
19.	Anak Agung Njoman Pantji Tisma	235	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 26-5-1951.
20.	Andi Gappa	144	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
21.	Andi Lolo, A. D.	147	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
22.	Andi Zainal Abidin, Mr.	206	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
23.	Anwar Tjokroaminoto	223	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 25-8-1950.
24.	Ardiwinangun	18	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
25.	Arso Sastroatmodjo	159	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
26.	Arudji Kartawinata	108	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan	Keterangan lain-lain	
27.	Asrarudin	45	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 15-8-1955.
28.	Assaat, Mr.	42	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
29.	Ateng Kartanahardja, Dr.	155	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
30.	Bachmid, A. S.	139	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
31.	B a s r i	129	DPR	-- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
32.	Baswedan, A. R.	47	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
33.	Bebasa Daeng Lalo	48	B P	-- KNIP	Djandji tgl. 19-9-1950.
34.	Boerhanoedin, Mr.	37	SENAT	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
35.	Boerhanoedin Harahap, Mr.	49	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-8-1955.
36.	Bastan Urip	24	SENAT	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
37.	Cyrillus Kersanegara,	236	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950.
38.	Taiijono, Mr. Mohd.	114	DPR	-- RIS	Djandji tgl. 21-8-1950.
39.	Daud Beureuh, Tengku	11	D.P.A.		Sumpah tgl 25-10-1950
40.	Dauhan, G. E.	152	DPR	-- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
41.	Dewantoro, Ki Hadjar	2	D.P.A.		Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 31-3-1954.
42.	Djapari, Dr. D. S.	203	DPR	-- RIS	Djandji tgl. 18-9-1950.
43.	Djaetun Dirdjowijoto	50	B p	-- KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 31-10-1954.
44.	Draidin Poerba, Mr.	21	SENAT	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
45.	Djaswadi Suprpto, R	158	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
46.	Djaelani, A.	32	SENAT	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
47.	Djerman Prawirawinata, R.	218	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
48.	Djody Gondokusumo, Mr.	51	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Non-aktif karena diang- kat sbg. Menteri Keha- kiman terhitung mulai tanggal 1-8-1953. Mengundurkan diri tanggal 25-11-1954.
49.	Djuir Mohamad	53	B P	-- KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
50.	Djohan, Ade Mohd.	198	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
51.	Djohan, Gusti	207	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
52.	Djohan Sjahroezah	70	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan		Keterangan lain-lain	
53.	Dj o h a r, K. A.	196	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
54.	Djokoprawiro, A. R.	40	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
55.	Djosoesdjono	52	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
56.	Dradjad Paroatmodjo, Dr.	157	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
57.	Emon Bratadiwidjaja, R.	203	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 21-8-1950.
58.	Emor Djadjadinata, R.	183	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
59.	Enoch, Ir. R. H. Mohd.	17	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-5-1951.
60.	Endon, Dr.	186	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
61.	Ersat Trunodjojo, Mohd.	173	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
62.	Farid Alwi Isa, H.	167	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
63.	Gondosuwandito, M.	20	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Dja- karta tanggal 2-6-1953.
64.	Hadikusumo, Ki Bagus	91	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950. Meninggal dunia di Jog- jakarta tanggal 2 - 9 - 1954.
65.	Hadikusuma, S.	54	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
66.	Hamid Algadrie, Mr.	117	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
67.	H a n a n, R.	23	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 3-10-1955.
68.	Harman, Mr.	55	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Ban- dung tgl. 3-10-1951.
69.	Hasan, Mohd.	181	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
70.	Hasan Basri	204	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
71.	Hasan, Mr. Teuku Mohd.	15	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
72.	Helmuth Kunum	35	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
73.	Hidajat Prawiroprodjo, RM.	190	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
74.	Hindrosudarmo, R.	56	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
75.	Hutomo Supardan	57	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
76.	Hamdadji Prawirosudirdjo	184	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
77.	Ibrahim Sedar	211	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
78.	Idham Chalid	205	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
79.	Iljes, h. Mohd.	189	DPR	--	RIS	Sumpah tgl 25-10-1950 Mengundurkan diri tanggal 1-10-1955.
80.	Indra Kesuma, Mr.	155	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
81.	Isa Anshary, Mohd.	217	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan	Keterangan lain-lain
82.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	133	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 23-11-1954.
83.	Jaman Sudjanaprawira	231	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 7-8-1954.
84.	Jamani, Mohd.	39	SENAT --- RIS	Sumpah tgl. 25-9-1951.
85.	Jumco, E	149	DPR --- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
86.	Jusuf, A.B.M.	41	SENAT --- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
87.	Jusuf Muda Dalam, Tengku	97	DPR -- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
88.	Jusuf Rasidi, A.M.	193	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
89.	Jusuf Wibisono, Mr.	90	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
90.	Kadmirah Karnadidjaja	226	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Bandung tgal. 27-9-1952.
91.	Kasimo, I. J.	107	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
92.	Kasman Singodimedjo, Mr.	58	B P --- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
93.	Kobarsjih	59	B P --- KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
94.	Krissubanu	60	B P --- KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
95.	Kunum Kusumojudo, E	202	DPR -- RIS	Djandji tgl. 18-9-1950.
96.	Koesnan, Rh.	109	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
97.	Langkai, J.	166	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
98.	Laoh, F	10	D.P.A.	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
99.	Lasut, R. C. L.	142	DPR -- RIS	Djandji tgl. 8-9-1952.
100.	Latjuba, M. L.	61	B P --- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 10-6-1955.
101.	Latuharhary, Mr. J.	130	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-5-1954.
102.	L o b o, I. R.	62	B P --- KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
103.	Luat Siregar, Mr.	119	DPR -- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jakarta 19-2-1953.
104.	Lukman Wiradinata, Mr.	102	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
105.	Machfud, Mohd.	171	DPR -- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
106.	Maizir Achmaddyn's	63	B P --- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan			Keterangan lain-lain
107.	Manai Sophaan	96	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
108.	Manopo, A. C.	141	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
109.	Manteiro, L. E.	148	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Non-aktif karena dinagkat mendjadi Kepala Daerah Flores sedjak tanggal 1-4-1952.
110.	Mantjanegara, R. B.	170	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
111.	Manuaba, I. B. P.	140	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
112.	Margono Djojohadikusumo, R.M.	3	D.P.A.	--		Sumpah tgl. 16-8-1950.
113.	Maruto Nitimihardjo	106	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
114.	Mayor Polak, J. B. A. F.	214	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
115.	Mochran bin Hadji Ali	34	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
116.	Moeis, G. A.	118	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
117.	Moeis, I. A.	208	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
118.	Mudikdjo, Njonja	100	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
119.	Musirin Sosrosubroto	221	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
120.	Mustapha	137	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 25-9-1953
121.	Natsir, Mohd.	89	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
122.	N a w a w i	224	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
123.	Nerus Ginting Suka	175	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 11-2-1955
124.	Ngadiman Hardjosubroto	99	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-3-1951.
125.	Ngeradjai Meliala	22	SENAT	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
126.	Nieuwenhuysen, W. M.	215	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
127.	Noh. Moh. (Riau)	31	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
128.	Noor, Ir. Pangeran Mohd.	7	D.P.A.			Sumpah tgl. 16-8-1950.
129.	Nuh, Mohd. (Sum-Sel).	180	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
130.	Nuh, Moh. (Sum-Timur).	177	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
131.	Nur el Ibrahimy, Mohd	92	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
132.	O l i l, T.	138	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
133.	Padang, Mohd.	131	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
134.	Palaunsoeka, F. C.	200	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
135.	Pandu Kartawiguna	222	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
136.	Pellaupessy, M. A.	14	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
137.	Peris Pardede	98	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.

No. Urut	Nama	No. Angg.	Alas perwakilan	Keterangan lain-lain	
138.	Pitoy, F. A. P.	150	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
139.	Pranoto, R. S.	161	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
140.	Prawoto Mangkusamito	86	B. P.	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
141.	PRawotosudibjo, S	185	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jogjakarta tgl. 21-12-1950
142.	Pupella, E. U.	151	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
143.	Radjiman Wedjodiningrat, Dr	4	D.P.A.	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Madiun tgl. 20-9-1952.
144.	Raka, I. G. G.	66	B P	-- KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 25-11-1954.
145.	Ramli, O. K.	176	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
146.	Rasjid Sutan Radja Emas	209	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
147.	Rasuna Said, Rangkajo	67	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
148.	Rivai, A. A.	36	SENAT	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
149.	Rondonuwu, A.	188	DPR	-- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meinggal dunia di Amsterdam (Negeri Belanda) tgl. 14-8-1955.
150.	Rondonuwu, O.	131	DPR	-- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
151.	Rotti, Ds. A.	153	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
152.	Saad, Mohd.	30	SENAT	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
153.	Sabilal Rasjad	65	B P	-- KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
154.	Saddak, R. Mohd.	178	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
155.	Sahetapy Engel, B.	143	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
156.	Said Ali, Sutan	127	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
157.	Said Bachreisi	162	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
158.	Sakirman, Ir	104	DPR	-- RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
159.	Saleh Umar	95	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
160.	Sardjono, S.	68	B P	-- KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
161.	Sarino Mangunpranoto	26	SENAT	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
162.	Saroso HARsono, R. M.	165	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
163.	Sartono, Mr.	94	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
164.	Sarwono S. Sutardjo	124	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
165.	Schmitz, G. R.	212	DPR	-- RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
166.	Setyabudhi, Dr. D. D.	12	D.P.A.		Belum/tidak mengangakat sumpah Meninggal dunia di Bandung tanggal 28-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan			Keterangan lain-lain
167.	Siauw Giok Tjhan	115	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
168.	Sidik Djojokusarto	69	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Surabaja tanggal 8-9-1955.
169.	Sidik Kartapati	234	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 18-8-1950.
170.	Sinaga, Dr. H.	125	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 6-10-1954.
171.	Sinaga, Philemon	174	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
172.	Siradjuddin Abbas, H.	128	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 19-11-1954.
173.	Sjafei, Mohd.	13	D.P.A.			Sumpah tgl 18-11-1950
174.	Sjamsuddin Sutan Makmur	80	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 12-8-1955.
175.	Slamet Tirtosubroto, R	182	DPR	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
176.	S n e l, J. P.	213	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
177.	Sonda Daeng Mattajang	145	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
178.	Sosrodanukumo, R. K.	169	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
179.	Subadio Sastrosatomo	101	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
180.	Subarnadi, M.	164	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
181.	Sudarso, Dr. M.	199	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
182.	Sudijono Djojoprajitno	71	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
183.	Sudjito, Dr. R. V.	25	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
184.	Sugih Tjokrosumarto, R	191	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
185.	Suhardi, Mr. A. A.	72	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-2-1955.
186.	Suhardjo	73	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
187.	Soejadi, R. A. A.	19	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Surabaja tgl. 23-11-1953.
188.	Sujono Hadinoto, Mr.	93	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
189.	Sukiman Wirjosandjojo Dr.	88	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
190.	Sulaeman Dzen	27	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
191.	Sumanang, Mr.	16	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 13-3-1954.
192.	S u m a r d i	227	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 22-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 22-8-1954.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan		Keterangan lain-lain	
193.	S u m a r t o	74	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
194.	Sumartojo	75	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
195.	Sunardi Adiwirjono	87	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
196.	Sunario, Mr.	219	DPR	--	RIS	Sumpah tgl 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 23-11-1954.
197.	Sunarjati Sukemi, Njonja	135	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
198.	Sunarjo Mangunpuspito, Njonja.	76	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
199.	Sundjoto, R.	84	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jog- jakarta tgl. 11-8-1950.
200.	Suparno, R.	220	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
201.	Surjaningprodjo, R.T.	160	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
202.	Suroso, R. Pandji	78	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 27-11-1954.
203.	Susilowati, Njonja	79	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
204.	Sutardjo Kartohadikusumo	1	D.P.A.			Sumpah tgl. 16-8-1950.
205.	Sutarto Hadisudibjo, R.H.	225	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
206.	Suwarni Pringgodigdo, Njonja	8	D.P.A.			Sumpah tgl. 16-8-1950.
207.	Suwarti, Nona	103	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
208.	Syaranamual, J. D.	81	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
209.	Tadjuddin Noor. Mr.	38	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
210.	Tambunan, Mr. A. M.	105	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
211.	Tan boen Aan, Ir.	163	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
212.	Tan Po Goan, Mr.	82	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
213.	Tauchid, Mohd.	113	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
214.	Tedjasukmana, R. Iskandar	83	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 15-8-1955.
215.	Teng Tjin Leng, Mr.	154	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
216.	Tjikwan, K. H.	122	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
217.	Tjoa Sio Hwie, Mr	168	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
218.	Tjoeng Lin Sen	201	DPR	--	RIS	Belum/tidak mengang- kat sumpah. Mengun- durkan diri tanggal 11- 1-1953.
219.	Tjoeng Tin Jan, Mr.	28	SENAT	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
220.	Tjokronegoro, Dr. A.	112	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-4-1954.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Alas perwakilan		Keterangan lain-lain	
221.	Trenggo, Dr. S. Hadibowo	187	DPR	--	RIS	Belum/tidak mengang- kat sumpah. Mengun- durkan diri tanggal 1-8- 1950.
222.	Tjugito	77	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
223.	Utarjo Purwosugito, S.	64	B P	--	KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
224.	Wardi Kusnatalistra	229	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 24-8-1950. Meninggal dunia di Tji- mah i tgl. 4-1-1956.
225.	Waroh, Njonja A.	146	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
226.	Werdojo. K.	110	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
227.	Wondoamiseno, W.	85	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Dja- karta tgl. 11-2-1952.
228.	Wurjaningrat, K.R.T.	5	D.P.A.	--		Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 18-11-1954.
229.	Yamin Mr. Mohd.	134	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 18-11-1954.
230.	Yap Tjwan Bing, Drs.	116	DPR	--	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-7-1954.
231.	Yatim Jacin, Mohd.	210	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
232.	Yunan Nasution Mohd.	120	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
233.	Zainal Abidin Ahmad, H.	121	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950.
234.	Zainal Alim, Mohd.	172	DPR	--	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
235.	Zainul Arifin.	44	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 25-11-1954.
236.	Zainul Baharuddin	46	B P	--	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.

**Perpustakaan  
Jendera**

9